



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2024



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



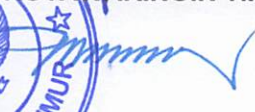
KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2024.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan capaian keberhasilan atas Penyelenggaraan SAKIP selama Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang menyajikan informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak terlepas dari peran dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah Kabupaten. Untuk itu kami ucapkan rasa syukur tak terhingga kehadiran Allah SWT dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan sumbang saran, data dan informasi sehingga laporan kinerja ini dapat diselesaikan. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat, dapat dijadikan umpan balik (*feed back*) dan sebagai booster perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, demi mencapai atau mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sampit, Maret 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

H. HAL KINNOR, S.H., M.M



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Akuntabilitas merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dan diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan dan amanah demi mewujudkan Visi “**Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera**”.

Laporan Kinerja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini disusun menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada periode tahun 2024.

Dari 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis atau sasaran kinerja yang diukur, 18 (delapan belas) di antaranya masuk predikat Sangat Tinggi (78,26%) dan 2 (dua) di antaranya masuk predikat Tinggi (8,70%) dan 3 (tiga) sasaran masuk predikat sedang (13,04%). Total rata-rata pencapaian sasaran tahun 2024 adalah 150,00% atau masuk predikat Sangat Tinggi.

Dari 41 (empat puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) indikator masuk predikat Sangat Tinggi (70,73%), 5 (lima) indikator masuk predikat Tinggi (12,20 %), 4 (empat) indikator masuk predikat Sedang (9,76%), 2 (dua) indikator masuk Rendah (4,88%), dan 1 (satu) indikator masuk predikat Sangat Rendah (2,44%).

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, dijelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Kemudian juga disajikan program berikut anggarannya pada masing-masing sasaran, realisasi anggaran yang mendukung realisasi sasaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran atau indikator kinerja.



Dari hasil pengukuran kinerja masih terlihat adanya kurangberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja sasaran di bawah seratus persen. Hal tersebut akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebesar 150,00%. Tercapainya capaian kinerja Sasaran ini karena adanya komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja akan menjadi prioritas dan perhatian dalam perencanaan kinerja ke depan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kondisi Umum	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Rencana Strategis	24
B. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Analisis Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	34
1. Analisis Kinerja Sasaran 1	34
2. Analisis Kinerja Sasaran 2	37
3. Analisis Kinerja Sasaran 3	39
4. Analisis Kinerja Sasaran 4	44
5. Analisis Kinerja Sasaran 5	46
6. Analisis Kinerja Sasaran 6	49
7. Analisis Kinerja Sasaran 7	55
8. Analisis Kinerja Sasaran 8	58
9. Analisis Kinerja Sasaran 9	60
10. Analisis Kinerja Sasaran 10	62
11. Analisis Kinerja Sasaran 11	63
12. Analisis Kinerja Sasaran 12	65
13. Analisis Kinerja Sasaran 13	67
14. Analisis Kinerja Sasaran 14	69
15. Analisis Kinerja Sasaran 15	74
16. Analisis Kinerja Sasaran 16	77
17. Analisis Kinerja Sasaran 17	80
18. Analisis Kinerja Sasaran 18	83
19. Analisis Kinerja Sasaran 19	87
20. Analisis Kinerja Sasaran 20	89
21. Analisis Kinerja Sasaran 21	90
22. Analisis Kinerja Sasaran 22	92
23. Analisis Kinerja Sasaran 23	97
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	100
D. Realisasi Anggaran	105
E. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	114
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Strategi Peningkatan Kinerja	120

LAMPIRAN

Pernyataan Reviu LKIP Tahun 2024 dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur

DAFTAR ISI



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Luas Wilayah Kecamatan Dan JumlahDesa/Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.....	5
Tabel 1.2	: Penyebaran dan Luas masing-masing Kelas Kemiringan Wilayah Daratan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024	6
Tabel 1.3	: Nama-Nama Sungai Besar Di Kabupaten Kotawaringin Timur	8
Tabel 1.4	: Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur.....	9
Tabel 1.5	: Jumlah Penduduk Kotawaringin Timur Tahun 2015 – 2024.....	11
Tabel 1.6	: Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024	11
Tabel 1.7	: Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2024	12
Tabel 1.8	: Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024	12
Tabel 1.9	: Struktur Penduduk Kab. Kotim per Kecamatan Tahun 2024.....	13
Tabel 1.10	: Jumlah Kepala Keluarga menurut Kecamatan Tahun 2024	14
Tabel 1.11	: Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2024	14
Tabel 1.12	: Rincian Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Kotawaringin Timur	16
Tabel 1.13	: Jumlah PNS PER SOPD Tahun 2024	20
Tabel 2.1	: Perjanjian Kinerja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.....	25
Tabel 2.2	: Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.....	27
Tabel 3.1	: Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	29
Tabel 3.2	: Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.....	31
Tabel 3.3	: Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024	32
Tabel 3.4	: Rekapitulasi Capaian IKU.....	33
Tabel 3.5	: Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2024	34
Tabel 3.6	: Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	36
Tabel 3.7	: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD	36
Tabel 3.8	: Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2024	36
Tabel 3.9	: Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2024	37
Tabel 3.10	: Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	38
Tabel 3.11	: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD	38
Tabel 3.12	: Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2024	39
Tabel 3.13	: Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2024	39
Tabel 3.14	: Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	42
Tabel 3.15	: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD	43
Tabel 3.16	: Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2024	43
Tabel 3.17	: Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2024	44
Tabel 3.18	: Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	45
Tabel 3.19	: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD	45
Tabel 3.20	: Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2024	45



Tabel 3.21 : Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2024	46
Tabel 3.22 : Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kab. Kotawaringin Timur	46
Tabel 3.23 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	47
Tabel 3.24 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD	47
Tabel 3.25 : Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2024	47
Tabel 3.26 : Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2024	49
Tabel 3.27 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	49
Tabel 3.28 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD	49
Tabel 3.29 : Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2024	50
Tabel 3.30 : Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2024	55
Tabel 3.31 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	57
Tabel 3.32 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD	57
Tabel 3.33 : Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2024	57
Tabel 3.34 : Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2024	58
Tabel 3.35 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	59
Tabel 3.36 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD	59
Tabel 3.37 : Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2024	59
Tabel 3.38 : Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2024	60
Tabel 3.39 : Fasilitas Olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024	60
Tabel 3.40 : Indikator capaian urusan olahraga Kab.Kotawaringin Timur 2019-2024.....	61
Tabel 3.41 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 9 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	61
Tabel 3.42 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD	61
Tabel 3.43 : Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2024	61
Tabel 3.44 : Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2024	62
Tabel 3.45 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 10 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	62
Tabel 3.46 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD	62
Tabel 3.47 : Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2024	63
Tabel 3.48 : Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2024	64
Tabel 3.49 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 11 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	64
Tabel 3.50 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD	64
Tabel 3.51 : Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2024	65
Tabel 3.52 : Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2024	66
Tabel 3.53 : Kinerja Urusan Operasi,Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kab. Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	66
Tabel 3.54 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 12 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	66
Tabel 3.55 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD	66
Tabel 3.56 : Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2024	67
Tabel 3.57 : Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2024	67
Tabel 3.58 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 13 Tahun 2024 dengan Target RPJMD	68
Tabel 3.59 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD	68
Tabel 3.60 : Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2024	69



Tabel 3.61 : Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2024	69
Tabel 3.62 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target RPJMD ..	70
Tabel 3.63 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD	70
Tabel 3.64 : Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2024	70
Tabel 3.65 : Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2024	74
Tabel 3.66 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target RPJMD	75
Tabel 3.67 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD	75
Tabel 3.68 : Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2024	75
Tabel 3.69 : Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024	76
Tabel 3.70 : Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2024	77
Tabel 3.71 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target RPJMD	79
Tabel 3.72 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD	79
Tabel 3.73 : Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2024	79
Tabel 3.74 : Realisasi Indikator Sasaran 17 Tahun 2024	80
Tabel 3.75 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target RPJMD ..	81
Tabel 3.76 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 terhadap target RPJMD	81
Tabel 3.77 : Program dan Anggaran Sasaran 17 Tahun 2024	81
Tabel 3.78 : Realisasi Indikator Sasaran 18 Tahun 2024	83
Tabel 3.79 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target RPJMD	84
Tabel 3.80 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 terhadap target RPJMD	84
Tabel 3.81 : Program dan Anggaran Sasaran 18 Tahun 2024	84
Tabel 3.82 : Realisasi Indikator Sasaran 19 Tahun 2024	87
Tabel 3.83 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target RPJMD	87
Tabel 3.84 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 terhadap target RPJMD	87
Tabel 3.85 : Program dan Anggaran Sasaran 19 Tahun 2024	88
Tabel 3.86 : Realisasi Indikator Sasaran 20 Tahun 2024	89
Tabel 3.87 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target RPJMD	90
Tabel 3.88 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 terhadap target RPJMD	90
Tabel 3.89 : Program dan Anggaran Sasaran 20 Tahun 2024	90
Tabel 3.90 : Realisasi Indikator Sasaran 21 Tahun 2024	91
Tabel 3.91 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target RPJMD	92
Tabel 3.92 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 21 terhadap target RPJMD	92
Tabel 3.93 : Program dan Anggaran Sasaran 21 Tahun 2024	92
Tabel 3.94 : Realisasi Indikator Sasaran 22 Tahun 2024	93
Tabel 3.95 : Kondisi Karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024	95
Tabel 3.96 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target RPJMD	96
Tabel 3.97 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 22 terhadap target RPJMD	96
Tabel 3.98 : Program dan Anggaran Sasaran 22 Tahun 2024	96
Tabel 3.99 : Realisasi Indikator Sasaran 23 Tahun 2024	98
Tabel 3.100 : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Target RPJMD	98
Tabel 3.101 : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 23 terhadap target RPJMD	99



Tabel 3.102 : Program dan Anggaran Sasaran 23 Tahun 2024	99
Tabel 3.103 : Data Anggaran Realisasi APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.	102
Tabel 3.104 : Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Tahun 2024	104



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Implementasi pemerintahan daerah dengan berbagai bentuk dan wujudnya, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara komprehensif. Upaya ini dilakukan melalui akselerasi pelayanan, progresifitas pelayanan, pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat, serta meningkatkan kemampuan kompetisi daerah dengan tidak mengabaikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kearifan lokal dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sisi lain, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek - aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, menggali potensi dan keanekaragaman daerah, serta mencermati peluang dan tantangan persaingan global. Otonomi daerah adalah pintu gerbang sekaligus jawaban yang tepat untuk mewujudkan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem NKRI. Melalui otonomi daerah, diharapkan dapat membuka gerbang kesempatan, kewenangan, keleluasaan dan kemandirian bagi Pemerintah Daerah.

Dalam konteks tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), berdaya guna, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan dilaporkan secara periodik. Pelaporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bupati / Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten / kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam konteks tersebut di atas dan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2026, telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026. Penyusunan LKIP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024. LKIP Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024, berisi berbagai upaya pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan (RKPd dan sebagainya). Penyajian pencapaian sasaran kinerja, dikemas dalam bentuk informasi pengukuran realisasi pencapaian sasaran indikator kinerja strategis, pencapaian sasaran RPJMD dan perbandingan realisasi pencapaian indikator kinerja. Dengan disusunnya LKIP ini, akan memberikan informasi kemajuan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur sepanjang tahun 2023 kepada Presiden melalui Kementerian terkait



(Kemenpan dan RB, Kemendagri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dan Gubernur Kalimantan Tengah).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini antara lain :

1. Untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan baik dan benar, berdasarkan peraturan / ketentuan yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
2. Untuk memonitor dan mengendalikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
3. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
4. Untuk bahan atau sebagai dasar pengambilan keputusan / kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun berikutnya ;
5. Sebagai umpan balik (*feed back*) bagi pihak - pihak yang berkepentingan, dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, guna mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini antara lain :

1. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang akuntabel, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, lingkungan yang aman, tertib dan kondusif ;
2. Terwujudnya suatu alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat dipertanggungjawabkan, tepat, jelas, terukur dan formal ;
3. Terwujudnya kepercayaan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik ;
4. Terhimpunnya berbagai informasi kinerja Perangkat Daerah (PD) yang krusial dan diperlukan dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. KONDISI UMUM

1. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Timur

1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959. Kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2002, wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan.

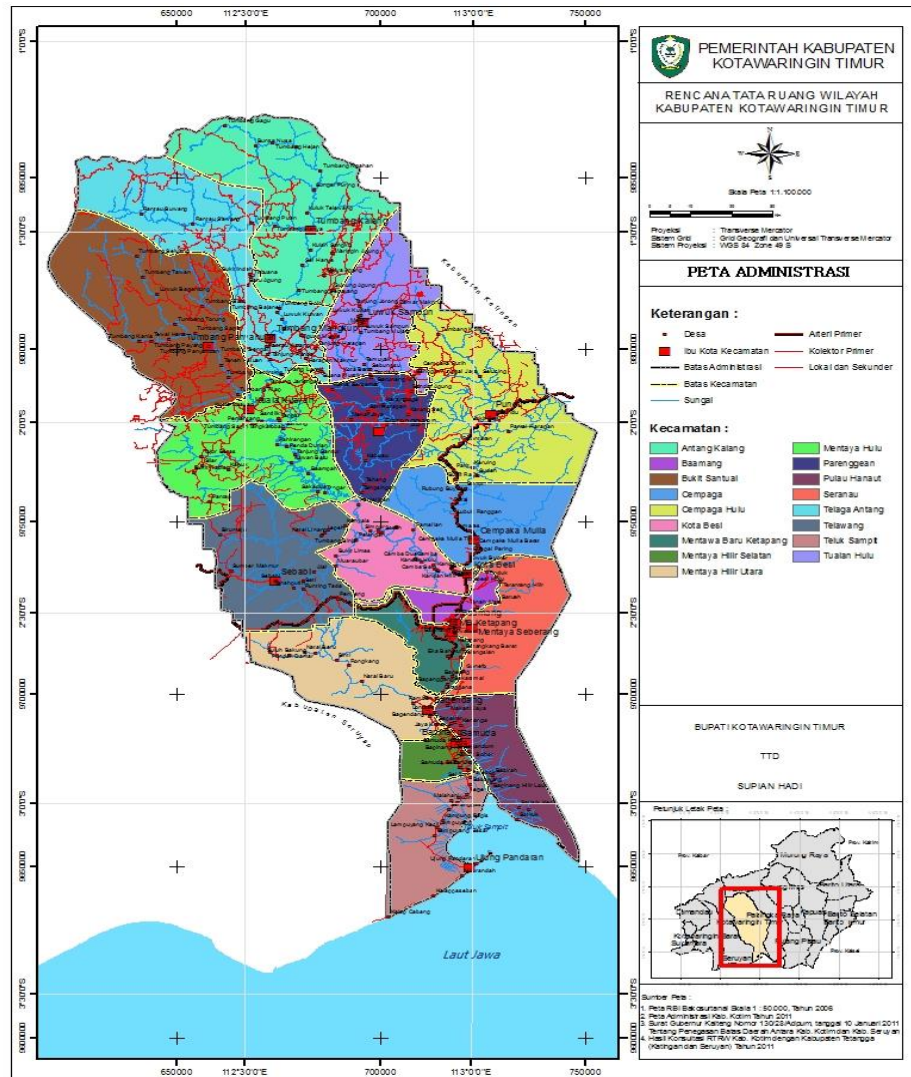
Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Tengah setelah Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Katingan memiliki potensi sumber daya alam yang relatif besar, dan sebagian dari potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Kabupaten Kotawaringin Timur beribukota di Sampit yang terletak diantara 112°7'29"-113°14'22" dan 1°11'50"-3°18'51" Lintang Selatan.

1.2 Data Geografis Wilayah

- 1) Batas Administrasi wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2024



1.3 Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

Pada saat ini Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai luas wilayah seluas $\pm 15.545 \text{ km}^2$ (Tabel 1.1) atau 10,94% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar, yang meliputi 17 wilayah kecamatan, 168 desa, 17 Kelurahan.



Tabel 1.1
**Luas Wilayah Kecamatan Dan Jumlah
Desa/Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Kota Besi	8/2	± 318,00
2.	Cempaga	8/0	± 864
3.	Mentaya Hulu	15/1	± 1.319
4.	Parenggean	14/1	± 718
5.	Baamang	1/5	± 207
6.	Mentawa Baru Ketapang	6/5	± 349
7.	Mentaya Hilir Utara	7/0	± 964
8.	Mentaya Hilir Selatan	8/2	± 210
9.	Pulau Hanaut	14/0	± 625
10.	Antang Kalang	15/0	± 1.605
11.	Teluk Sampit	6/0	± 662
12.	Seranau	5/1	± 709
13.	Cempaga Hulu	11/0	± 1.503
14.	Telawang	6/0	± 1.177
15.	Bukit Santuai	14/0	± 1.684
16.	Kec. Tualan Hulu	11/0	± 846
17.	Kec. Telaga Antang	18/0	± 1.462
	Kotawaringin Timur	168/17	168/17

1.4 Topografi

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki topografi yang bervariasi, dapat dibagi dalam tiga kelompok lereng yaitu 0 – 2 %, 2 – 15 % dan 15 – 40 %, wilayah Kabupaten ini tidak memiliki lahan dengan tingkat kemiringan lebih dari 40%, sebagian besar merupakan dataran rendah 0 – 2 % dengan luasan 496.367,68 Ha yang meliputi bagian selatan, sedangkan bagian tengah memanjang dari timur ke barat memiliki kemiringan 2 – 15 % dengan luas kawasan lereng 503.331,89 Ha. Sedangkan bagian utara merupakan dataran tinggi 15-40% dengan luas 554.810,34 Ha terutama diwilayah yang tidak dialiri sungai.

Secara umum keadaan tofografi Kabupaten Kotawaringin Timur bervariasi dengan kisaran 0 – 60 meter di atas permukaan laut, dimana sebagian besar merupakan dataran rendah yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah, memanjang dari timur ke barat. Sedangkan



pada bagian utara merupakan dataran tinggi yang berbukit yang didominasi jenis tanah padsonik merah kuning, dan beberapa bagian lain berjenis tanah alluvial, organosol dan lithosol.

Dilihat dari topografi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dibagi dalam 3 (tiga) zona daerah, yaitu :

- Daerah pegunungan dengan ketinggian 100-500 m dpl;
- Daerah bergelombang/berbukit dengan tinggian 100-200m dpl;
- Daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-50 m dpl.

Daerah berbukit hingga pegunungan yang terdiri dari batuan intrusi masam terdapat dibagian utara wilayah ini, sedangkan bagian tengah sampai dengan selatan banyak di dominasi oleh dataran rendah. Dataran bagian tengah terdiri dari dominasi gambut serta dataran rendah endapan sungai (fluvial) serta backswamp atau rawa belakang di sepanjang aliran sungai. Bagian selatan, dataran rendah di dominasi oleh dataran rendah endapan pantai (fluvio marine) dan pesisir pantai.

Tabel 1.2
Penyebaran dan Luas masing-masing Kelas
Kemiringan Wilayah Daratan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

No	Kelas Lereng (m)	Luas (Ha)	Persentase
1.	0 – 2	496.367,68 Ha	30,09
2.	2 – 15	503.331,89 Ha	30,51
3.	15 – 40	554.810,34 Ha	33,63
4.	> 40	--	--

Sumber: BAPPEDA (Kotim dalam angka Tahun 2024)

a. Jenis Tanah

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi 3 (tiga) tanah yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian geografis. Di pesisir atau di bagian selatan terdiri dari Alluvia Marine yang memiliki kandungan hara rendah. Sedang di bagian tengah sebagian besar jenis tanahnya adalah podsol air tanah, podsol kuning dan alluvial gleihumus yang berada di sepanjang sungai. Wilayah ini memiliki kendala pada drainase yang terhambat. Sedangkan dibagian utara sebagian besar jenis tanahnya adalah Podsolik Merah Kuning, regosol dan litosol. Wilayah ini terdiri dari batuan, sebagian bersifat masam. Memiliki kandungan hara yang rendah dan berbukit-bukit. Kemampuan tanah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi lereng, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase erosi serta faktor pembatas lainnya. Secara umum kondisi kemampuan tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sepanjang aliran sungai Mentaya memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, bertekstur sedang, tergenang secara periodik dan tidak ada erosi;
- Dibagian barat wilayah Kabupaten yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, Baamang dan Kota Besi memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, bertekstur sedang, tidak pernah tergenang dan tidak ada erosi;
- Semakin ke utara kemampuan tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, bertekstur halus, tidak pernah tergenang dan tidak ada erosi.



Jenis tanah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

a. Bagian Selatan

Sebagian besar jenis tanahnya adalah organosol dan alluvial glei humus yang memiliki kendala pada drainase yang terhambat namun memiliki kandungan unsur hara yang baik. Di bagian pesisir terdiri dari alluvial marine yang memiliki kandungan unsur hara rendah.

b. Bagian Tengah

Sebagian besar jenis tanahnya adalah podsol air tanah, podsol kuning dan alluvial glei humus yang berada di sepanjang sungai. Wilayah ini memiliki kendala drainase yang terhambat.

c. Bagian Utara

Sebagian besar jenis tanahnya adalah podsolik merah kuning, regosol dan litosol. Wilayah ini terdiri dari batuan, sebagian bersifat masam, memiliki kandungan hara yang rendah dan berbukit-bukit.

b. Geologi

Geologi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersusun oleh 4 jenis formasi yaitu Formasi Dahor, Formasi Kuayan, Formasi Mentaya dan Formasi Pembuang dan endapan Aluvial. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi masing-masing formasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Formasi Dahor terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di sebelah timur dan barat satuan Aluvial disepanjang Daerah Aliran Sungai Mentaya. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun formasi Dahor ini terdiri dari konglomerat dengan komponen fragmen kuarsif dan basal berselingan dengan batu pasir, batu lempung. Umur formasi ini diperkirakan Miosen Tengah sampai Pleistosen, berdasarkan korelasi dengan formasi Dahor dilembar Tewah (Sumintadipura, 1976). Tebal formasi ini diperkirakan 300 m yang diendapkan di lingkungan paralik.
2. Formasi Kuayan terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di Utara. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun formasi Kuayan ini terdiri dari breksi dengan komposisi andesit dan basal, aliran lava, batu pasir tufaan dan tuf. Formasi ini tidak dapat ditentukan umurnya, tetapi di Kalimantan Barat, Van Emmichoven (1939) op. Cit. Margono U, dkk (1995) menemukan fosil di formasi ini berumur Trias.
3. Formasi Mentaya terletak di sekitar Kota Kuala Kuayan. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Mentaya ini dibagian bawah didominasi oleh batu pasir sedangkan dibagian atas batu pasir arkosa berbutir halus-kasar, terdapat struktur silang siur (cross bedding) dan gelembur gelombang. Setempat terdapat sisipan konglomerat kuarsa dan batu lempung yang kadang-kadang mengandung batubara. Formasi ini diendapkan pada kala Eosen-Oligosen dalam lingkungan pengendapan litoral, setempat berupa rawa-rawa.
4. Formasi Pembuang terletak dibagian selatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama di sekitar Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Pembuang ini terdiri dari batupasir karbonan (carbonaceous sandstone), konglomerat (conglomerate), batulanau (siltstone), batu lempung (claystone) dan gambut (peat).
5. Endapan aluvial, tersusun oleh endapan delta (deltaic deposit) dan endapan klastika tak terpisahkan (undifferentiated clastic deposit). Endapan delta terdiri dari pasir kasar-halus (coarse to fine grained sands), lanau (silt) dan lumpur (mud). Sedangkan endapan klastika tak terpisahkan terdiri dari pasir (sand), lanau (silt), lempung (clay) dan gambut (peat). Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah struktur



sesar/patahan bencana alam geologi. Daerah yang rawan terhadap bencana alam geologi ini antara lain kecamatan mentaya hulu karena pada daerah ini terdapat struktur sesar / patahan. Potensi pertambangan bahan galian yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain batubara, bijih besi, emas primer (dengan asosiasi mineral perak dan atau mineral tembaga timah hitam atau seng), emas sekunder, kwarsa kristal (termasuk kecubung atau amestik) bentonit, kaolin, pasir kwarsa, granit, gembut dan tanah liat.

Selain itu, Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari berbagai macam batuan, endapan, dan di beberapa bagian terdapat sesar. Struktur geologi tersebut mengakibatkan wilayah ini memiliki cukup banyak potensi bahan galian tambang yang dapat dimanfaatkan, baik bahan galian A,B, maupun C. Bahan-bahan galian yang banyak terdapat di wilayah ini meliputi batubara, air raksa, emas, kaolin, biji besi, pasir kwarsa, granit, gambut, bauksit dan lain-lain. Potensi bahan galian ini tersebar hampir diseluruh wilayah.

c. Hidrologi

Secara umum pola sungai di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah-daerah yang ada disekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai.

Dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 6 (enam) buah sungai besar yang mengalir dari utara ke selatan dan bermuara di laut jawa, yang dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai prasarana transportasi. Keenam sungai tersebut dapat dilayari oleh sarana perhubungan seperti kapal, speed boat, dan long boat. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh pendudukan untuk mandi, cuci, kakus (mck), air minum, serta persawahan. Selain air sungai, penduduk juga memanfaatkan air tanah. Menurut RUT Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 1992 kedalaman air tanah berkisar antara 1 sampai 7 meter pada sistem lahan dataran (wilayah pengamatan pada kecamatan Parenggean, Mentawa Baru Ketapang), sedangkan pada sistem lahan perbukitan kedalaman air tanah lebih dari 7 meter.

Tabel 1.3
Nama-Nama Sungai Besar Di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Dapat dilayari (Km)	Kedalaman Rata-rata (m)	Lebar rata-rata (m)
1	Mentaya	400	270	6	400
2	Cempaga	42	38	6	250
3	Sampit	46	40	6	200
4	Tualan	48	-	-	-
5	Kuayan	18	40	6	200
6	Kalang	21	18	3	200
7	Seranau	20	21	3	200

Sumber : RTRW Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur 2018

Diantara keenam sungai tersebut sungai mentaya merupakan sungai terbesar di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sungai ini mengandung podsolik di bagian atasnya, terdiri dari bantuan sedimen, pasir, dan alluvium. Pada daerah pesisir berawa dengan permeabilitas tinggi.



Panjang sungai mentaya adalah 350 Km, yang dapat dilayari 300 Km, kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar adalah 300 meter dengan anak sungai :

- ✓ Anak sungai Sampit panjang + 75 Km
- ✓ Anak sungai Cempaga panjang + 100 Km
- ✓ Anak sungai Seranau panjang + 75 Km
- ✓ Anak sungai Tualan panjang + 80 Km
- ✓ Anak sungai Kuayan panjang + 100 Km
- ✓ Anak sungai Kalang panjang + 65 Km

Kondisi Hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki banyak sungai, secara umum pola sungainya adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai (DAS) maka puncak banjirnya akan demikian tinggi sehingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah – daerah yang ada disekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Beberapa sungai besar yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Sungai Mentaya, Sungai Cempaga, Sungai Sampit, Sungai Kuayan, Sungai Kalang dan Sungai Seranau, salah satu sungai terbesar dan terpanjang diwilayah ini adalah Sungai Mentaya dengan panjang $\pm$ 350 Km (yang dapat dilayari $\pm$ 300 Km) dan lebar sungai $\pm$ 300 m serta memiliki kedalaman rata-rata enam meter. Beberapa anak sungai yang cukup besar antara lain adalah Sungai Sampit, Sungai Cempaga, Sungai Seranau, Sungai Kuayan, Sungai Tualan dan Sungai Kalang (Bappeda Kotim, 2017).

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi hutan, kebun, sawah, rawa, semak belukar, rawa belukar, tanah terbuka, tubuh air dan lain-lain. Pada tahun 2015 penggunaan lahan eksisting tersebar di Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi kebun, baik PBS maupun kebun masyarakat seluas 493.377,997 Ha atau sekitar 29,91% dari luas wilayah kabupaten dan semak belukar sebesar 337.477,494 Ha atau 20,46%. Penggunaan untuk permukiman relatif sangat kecil hanya 25.575.173 Ha atau 1, 55%, sawah sebesar 36.930.171 Ha atau 2,24%. Permukiman yang ada pada umumnya tersebar di kota, ibu kota kecamatan dan desa sepanjang aliran sungai.

Dari tahun 2002-2004 tidak ada perubahan pada pemanfaatan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur, pemanfaatan lahan tersebar masih hutan belantara yakni 69,52% dari luas Kalimantan Tengah kemudian pertanian 21,72% dari luas Kalimantan Tengah, diikuti rawa-rawa, sungai, danau dan lainnya. Tahun 2015 pemanfaatan lahan Kabupaten Kotawaringin Timur lebih bervariasi dari 4 jenis pemanfaatan menjadi 15 (lima belas) jenis pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan yang paling mendominasi pada tahun 2014 adalah Perkebunan sekitar 29,91%, kemudian Semak Belukar sekitar 20,46%, Rawa 18,49 % terhadap luas Kotawaringin Timur.

Tabel 1.4
Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur

NO.	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	PROSENTASE (%)
KAWASAN LINDUNG			
1	Hutan Lindung	5.108	0,31
2	Resapan Air	230.825	13,99
3	Sempadan Pantai	6.858	0,42
4	Sempadan Sungai	37.357	2,26
5	Ruang Terbuka Hijau	783	0,05
6	Hutan Wisata	640	0,04



NO.	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	PROSENTASE (%)
7	Pantai Berhutan Bakau	9.829	0,60
8	Rawan Longsor	66.638	4,04
9	Rawan Banjir	137	0,01
KAWASAN BUDIDAYA			
1	Hutan Produksi	618.037	37,47
2	Hortikultura	61.355	3,72
3	Pertanian Lahan Basah	31.544	1,91
4	Pertanian Lahan Kering	181.069	10,98
5	Perkebunan	322.704	19,56
6	Pertambangan	28.484	1,73
7	Pemukinan	12.040	0,73
8	Lainnya	36.192	2,19
JUMLAH		1.649.600	100,00

Sumber Data : Bappeda Kab.Kotim Tahun 2018

d. Iklim

Kondisi Iklim Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk beriklim tropis basah (lembab) dengan tipe B (menurut Schimdt dan Ferguson) dengan kelembaban nisbi berkisar antara 82%-89% dan suhu rata-rata bulanan berkisar antara 270 C – 360C.

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Kabupaten dengan curah hujan bervariasi. Pada daerah pedalaman kecenderungan curah hujannya tinggi sedang dikawasan pantai memiliki curah hujan sedang. Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah Kabupaten ini berkisar antara 1.934 mm / tahun.

e. Jumlah Penduduk

Pada pertengahan Tahun 2023 penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 433.679 jiwa yang terdiri dari penduduk perempuan 209.380 jiwa (51.73%) dan penduduk laki-laki 224.299 jiwa (48,27 %). Terjadi lonjakan jumlah penduduk dari tahun 2020 s/d 2023 jika dilihat dari table 1.7 Jumlah Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yaitu 103.247 Jiwa, hal ini disebabkan karena Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berada di pusat Kabupaten Kotawaringin Timur yang juga merupakan akses keluar dan menuju Kota Sampit dengan berbagai fasilitas penunjang sehingga pemukiman, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas pendukung lainnya berada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan camatan Baamang.

Tertib Administrasi Kependudukan menuntut kita untuk memberikan sosialisasi akan pentingnya sebuah identitas diri yang sangat diperlukan baik oleh pemilik dokumen kependudukan maupun bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengetahui tentang klasifikasi penduduk dari berbagai elemen data baik jenis kelamin, pendidikan, agama, usaha, umur dan sebagainya.



Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kotawaringin Timur
Tahun 2015 – 2023

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2015	404.743
2.	2016	406.429
3.	2017	409.502
4.	2018	411.852
5.	2019	414.463
6.	2020	416.138
7.	2021	416.277
8.	2022	417.509
9.	2023	433.679

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Kotim (Buku Agregat kependudukan semester I tahun 2015-2023)

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	L + P
1.	Kec. Kota Besi	10.619	9.538	20.157
2.	Kec. Cempaga	12.168	11.089	23.257
3.	Kec. Mentaya Hulu	10.124	8.984	19.108
4.	Kec. Parenggean	14.468	13.546	28.014
5.	Kec. Baamang	36.886	35.503	72.389
6.	Kec. M. Baru Ketapang	52.782	50.465	10.3247
7.	Kec. Mentaya Hilir Utara	8.686	8.148	16.834
8.	Kec. Mentaya Hilir Selatan	12.372	11.769	24.141
9.	Kec. Pulau Hanaut	8.888	8.196	17.084
10.	Kec. Antang Kalang	6.953	6.324	13.277
11.	Kec. Teluk Sampit	5.860	5.334	11.194
12.	Kec. Seranau	6.069	5.621	11.690
13.	Kec. Cempaga Hulu	10.661	9.763	20.424
14.	Kec. Telawang	8.862	7.878	16.740
15.	Kec. Bukit Santuai	4.079	3.581	7.660
16.	Kec. Tualan Hulu	4167	3.760	7.927
17.	Kec. Telaga Antang	10655	9.881	20.536
Jumlah		224.299	209.380	433.679

Sumber : Buku Agregat kependudukan semester I tahun 2023



Tabel 1.7
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2013 – 2023

No.	Tahun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	2013	209.243	191.266	400.509
2.	2014	210.690	192.994	403.684
3.	2015	210.318	194.425	404.743
4.	2016	211.358	195.071	406.429
5.	2017	212.650	196.852	409.502
6.	2018	213.418	198.434	411.852
7.	2019	214.117	200.346	414.463
8.	2020	215.244	200.894	416.138
9	2021	215.188	201.089	416.277
10	2022	215.352	202.157	417.509
11.	2023	224.299	209.380	433.679

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Kotim (Buku Agregat kependudukan semester I Tahun 2013-2023)

Tabel 1.8
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2022	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk Jumlah penduduk Luas wilayah (Km2)
1	Kec. Kota Besi	20.157	639	31,54
2	Kec. Cempaga	23.257	866	26,92
3	Kec. Mentaya Hulu	19.108	1.319	14,49
4	Kec. Parenggean	28.014	718	39,02
5	Kec. Baamang	72.389	207	349,71
6	Kec. M. Baru Ketapang	103.247	349	295,84
7	Kec. Mentaya Hilir Utara	16.834	964	17,46
8	Kec. Mentaya Hilir Selatan	24.141	210	114,96
9	Kec. Pulau Hanaut	17.084	625	27,33
10	Kec. Antang Kalang	13.277	1.605	8,27
11	Kec. Teluk Sampit	11.194	663	16,91



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2022	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk Jumlah penduduk Luas wilayah (Km2)
12	Kec. Seranau	11.690	708	16,49
13	Kec. Cempaga Hulu	20.424	1.503	13,59
14	Kec. Telawang	16.740	1.177	14,22
15	Kec. Bukit Santuai	7.660	1.684	4,55
16	Kec. Tualan Hulu	7.927	846	9,37
17	Kec. Antang Kalang	20.536	1.462	14,05
	JUMLAH	433.679	15.545	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kotim 2022 (diolah)

Tabel 1.9
Struktur Penduduk Kab. Kotim per Kecamatan Tahun 2023

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
75 keatas	3.079	2.748	5827
70 -74 Tahun	2.954	2.565	5519
65 – 69 Tahun	5.012	4.066	9078
60 – 64 Tahun	7.246	6.477	13723
55 – 59 Tahun	10.308	5.954	19262
50 – 54 Tahun	13.925	12.301	26226
45 – 49 Tahun	16.232	14.920	31152
40 – 44 Tahun	18.878	18.009	36887
35 – 39 Tahun	17.898	17.653	35551
30 – 34 Tahun	18.116	17.882	35998
25 – 29 Tahun	17.582	16.338	33920
20 – 24 Tahun	19.960	19.080	39040
15 – 19 Tahun	16.897	15.837	32734
10 – 14 Tahun	21.970	20.363	42333
5 – 9 Tahun	20.729	19.696	40.125
0 – 4 Tahun	13.513	12.791	26.304
JUMLAH	224.299	209.380	433.679

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Kotim (Buku Agregat kependudukan semester I tahun 2023)



Tabel 1.10
Jumlah Kepala Keluarga menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Keterangan
1	Kec. Kota Besi	6.205	-
2	Kec. Cempaga	7.188	-
3	Kec. Mentaya Hulu	6.035	-
4	Kec. Parenggean	8.934	-
5	Kec. Baamang	22.516	-
6	Kec. M. Baru Ketapang	32.587	-
7	Kec. Mentaya Hilir Utara	5.359	-
8	Kec. Mentaya Hilir Selatan	7.841	-
9	Kec. Pulau Hanaut	5.578	-
10	Kec. Antang Kalang	4.164	-
11	Kec. Teluk Sampit	3.545	-
12	Kec. Seranau	3.705	-
13	Kec. Cempaga Hulu	6.367	-
14	Kec. Telawang	5.336	-
15	Kec. Bukit Santuai	2.508	-
16	Kec. Tualan Hulu	2.600	-
17	Kec. Antang Kalang	6.510	-
	JUMLAH	136.978	-

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Kotim (Buku Agregat kependudukan semester I tahun 2023)

Tabel 1.11
Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		
		LK	PR	Total
1	01-Belum/Tidak Bekerja	65276	59214	124490
2	02-Mengurus Rumah Tangga	43	92770	92813
3	03-Pelajar/Mahasiswa	36588	28008	64596
4	04-Pensiunan	999	326	1325
5	05-Pegawai Negeri Sipil	3470	3285	6755
6	06-Tentara Nasional Indonesia	456	2	458
7	07-Kepolisian RI	979	53	1032
8	08-Perdagangan	563	2234	797



9	09-Petani/Pekebun	37826	7397	45223
10	10-Peternak	112	7	119
11	11-Nelayan/Perikanan	1186	52	1238
12	12-Industri	47	4	51
13	13-Konstruksi	44	2	45
14	14-Transportasi	207	4	211
15	15-Karyawan Swasta	34194	7534	41728
16	16-Karyawan BUMN	338	130	468
17	17-Karyawan BUMD	109	29	138
18	18-Karyawan Honorer	1349	1251	2600
19	19-Buruh Harian Lepas	9103	689	9792
20	20-Buruh Tani/Perkebunan	4199	1126	5325
21	21-Buruh Nelayan/Perikanan	133	13	146
22	22-Buruh Peternakan	33	7	40
23	23-Pembantu Rumah Tangga	2	192	194
24	24-Tukang Cukur	54	1	55
25	25-Tukang Listrik	74	0	74
26	26-Tukang Batu	1063	1	1064
27	27-Tukang Kayu	1222	0	1222
28	28-Tukang Sol Sepatu	15	0	15
29	29-Tukang Las/Pandai Besi	93	0	93
30	30-Tukang Jahit	92	67	159
31	31-Tukang Gigi	8	1	9
32	32-Penata Rias	13	32	45
33	33-Penata Busana	0	3	3
34	34-Penata Rambut	19	23	42
35	35-Mekanik	759	0	759
36	36-Seniman	35	1	36
37	37-Tabib	16	3	19
38	38-Paraji	8	16	24
39	39-Perancang Busana	0	5	5
40	40-Penterjemah	1	1	2
41	41-Imam Mesjid	40	0	40
42	42-Pendeta	81	59	140
43	43-Pastor	1	0	1
44	44-Wartawan	52	4	56
45	45-Ustadz/Mubaligh	102	7	109
46	46-Juru Masak	5	8	13
47	47-Promotor Acara	1	0	1
48	48-Anggota DPR RI	1	0	1
49	49-Bupati	1	0	1
50	50-Wakil Bupati	1	1	2



51	51-Anggota DPR-prov	3	1	4
52	52-Anggota DPRD KAB/KOTA	28	9	37
53	53-Dosen	58	24	82
54	54-Guru	625	1294	1919
55	55-Pilot	1	0	1
56	56-Pengacara	20	1	21
57	57-Notaris	10	6	16
58	58-Arsitek	3	1	4
59	59-Konsultan	13	0	13
60	60-Dokter	52	76	128
61	61-Bidan	0	321	321
62	62-Perawat	141	232	373
63	63-Apoteker	11	33	44
64	64-Psikiater/Psikolog	0	1	1
65	65-Penyiar Radio	2	2	4
66	66-Pelaut	76	0	76
67	67-Peneliti	4	1	5
68	68-Sopir	2434	0	2434
69	69-Pialang	1	1	2
70	70-Paranormal	1	1	2
71	71-Pedagang	3913	1489	5402
72	72-Perangkat Desa	273	69	342
73	73-Kepala Desa	115	3	118
74	74-Biarawati	0	8	8
75	75-Wiraswasta	15484	3242	18726
76	76-Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	18	3	21
TOTAL		224.299	209.380	433.679

Sumber : Dinas Dukupil Kab. Kotim 2023 (Buku Agregat kependudukan semester I)

f. Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan

Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, 17 (tujuh belas) Kelurahan dan 168 (seratus enam puluh delapan) Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.12
Rincian Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Di Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1.	TELUK SAMPIT	DESA PAREBOK DESA BASAWANG DESA LAMPUYANG DESA UJUNG PANDARAN DESA REGE LESTARI DESA KUIN PERMAI	
2.	PULAU HANAUT	DESA BAPINANG HULU DESA BAPINANG HILIR	



		DESA BAPINANG HILIR LAUT DESA SATIRUK DESA MAKARTI JAYA DESA RAWASARI DESA HANAUT DESA BABIRAH DESA SERAMPUT DESA BABAUNG DESA BAMADU DESA PENYAGUAN DESA HANTIPAN DESA BANTIAN	
3.	MENTAYA HILIR SELATAN	DESA JAYA KELAPA DESA BASIRIH HULU DESA JAYA KARET DESA SAMUDA KECIL DESA SAMUDA BESAR DESA SEBAMBAN DESA HANDIL SOHOR DESA SEI IJUM RAYA	KEL. SAMUDA KOTA KEL. BASIRIH HILIR
4.	MENTAYA HILIR UTARA	DESA BAGENDANG HULU DESA BAGENDANG HILIR DESA BAGENDANG TENGAH DESA NATAI BARU DESA PONDOK DAMAR DESA SUMBER MAKMUR DESA BAGENDANG PERMAI	
5.	MENTAWA BARU KETAPANG	DESA PELANGSIAN DESA BAPEANG DESA EKA BAHURUI DESA TELAGA BARU DESA BANGKUANG MAKMUR DESA BAPANGGANG RAYA DESA BASIRIH HULU	KEL. MENTAWA BARU HILIR KEL. KETAPANG KEL. SAWAHAN KEL. PASIR PUTIH KEL. MENTAWA BARU HULU
6.	SERANAU	DESA TERANTANG DESA BATUAH DESA TERANTANG HILIR DESA GANEPO DESA SERAGAM RAYA	KEL. MENTAYA SEBERANG
7.	BAAMANG	DESA TINDUK	KEL. BAAMANG HULU KEL. BAAMANG TENGAH KEL. BAAMANG HILIR KEL. BAAMANG BARAT KEL. TANAH MAS
8.	KOTA BESI	DESA CAMBA DESA HANJALIPAN DESA SIMPUR DESA PALANGAN DESA PAMALIAN DESA KANDAN DESA BAJARUM DESA RASAU TUMBUH DESA SOREN	KEL. KOTA BESI HULU KEL. KOTA BESI HILIR
9.	CEMPAGA	DESA RUBUNG BUYUNG DESA PATAI DESA LUBUK RANGGAN DESA JEMARAS DESA CEMPAKA MULIA TIMUR	



		DESA CEMPAKA MULIA BARAT DESA LUWUK BUNTER DESA SUNGAI PARING	
10.	CEMPAGA HULU	DESA PUNDU DESA KERUING DESA PARIT DESA PANTAI HARAPAN DESA PELANTARAN DESA TUMBANG KOLING DESA SUDAN DESA BUKIT BATU DESA BUKIT RAYA DESA SELUCING DESA SUNGAI UBAR MANDIRI	
11.	PARENGGEAN	DESA TEHANG DESA KABUAU DESA BANDAR AGUNG DESA BARUNANG MIRI DESA MEKAR JAYA DESA KARANG TUNGGAL DESA SARI HARAPAN DESA KARANG SARI DESA SUMBER MAKMUR DESA BERINGIN TUNGGAL JAYA DESA BAJARAU DESA BUKIT HARAPAN DESA MANJALIN DESA KARYA BERSAMA	KEL. PARENGGEAN
12.	MENTAYA HULU	DESA PENDA DURIAN DESA BAWAN DESA TANJUNG JARIANGAU DESA TANJUNG BATUR DESA TANGKA ROBAH DESA SATIUNG DESA TUMBANG SAPIRI DESA TANGAR DESA KAWAN BATU DESA SANTILIK DESA BAAMPAH DESA PAHIRANGAN DESA PEMANTANG DESA KAPUK DESA PANTAP	KEL. KUALA KUAYAN
13.	ANTANG KALANG	DESA BUNTUT NUSA DESA TUMBANG NGAHAN DESA TUMBANG GAGU DESA KULUK TELAWANG DESA TUMBANG KALANG DESA TUMBANG RAMEI DESA TUMBANG SEPAYANG DESA SUNGAI HANYA DESA TUMBANG HEJAN DESA TUMBANG MANYA DESA SUNGAI PURING DESA BHAKTI KARYA DESA GUNUNG MAKMUR DESA WARINGIN AGUNG DESA MULYA AGUNG	
14.	TELAWANG	DESA SEBABI DESA TANAH PUTIH	



		DESA SUMBER MAKMUR DESA PENYANG DESA KENYALA DESA BIRU MAJU	
15.	BUKIT SANTUAI	DESA TUMBANG TILAP DESA TUMBANG KAMINTING DESA TANAH HALUAN DESA TUMBANG PENYAHUAN DESA TUMBANG SAPIA DESA TUMBANG GETAS DESA TEWEI HARA DESA TUMBANG PAYANG DESA TUMBANG KANIA DESA TUMBANG TAWAN DESA LUNUK BAGANTUNG DESA TUMBANG TORUNG DESA TUMBANG BATU DESA TUMBANG SALUANG	
16.	TUALAN HULU	DESA LUWUK SAMPUN DESA TUMBANG MUJAM DESA MERAH DESA TANJUNG JORONG DESA SEBUNGSU DESA BUKIT MAKMUR DESA WONOSARI DESA MEKAR SARI DESA DAMAR MAKMUR DESA CEMPAKA PUTIH DESA JATIWARINGIN	
17.	TELAGA ANTANG	DESA TUMBANG BOLOI DESA TUMBANG BAJANEI DESA LUWUK KOWAN DESA RANTAU TAMPANG DESA TUMBANG MANGKUP DESA RANTAU KATANG DESA TUMBANG SANGAI DESA TUKANG LANGIT DESA BERINGIN AGUNG DESA AGUNG MULYA DESA BATU AGUNG DESA BUKIT INDAH DESA TUMBANG PUAN DESA RANTAU SUANG DESA RANTAU SAWANG DESA TRIBUANA DESA TANJUNG HARAPAN DESA BUANA MUSTIKA	
	JUMLAH	168	17

Sumber data : Dinas PMD Kab. Kotim

g. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah



Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 51 Perangkat Daerah dengan Total Pegawai Negeri Sipil berjumlah 5147 per 31 Desember Tahun 2023 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.13
Jumlah PNS PER SOPD Tahun 2023

NO	UNIT ORGANISASI/ SOPD	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21	22	43
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13	12	25
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	25	21	46
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16	3	19
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24	17	41
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	23	14	37
7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	15	15	30
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	11	20	31
9	DINAS KESEHATAN	232	581	813
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	6	7	13
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13	10	23
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	13	10	23
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30	14	44
14	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	45	13	58
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	34	15	49
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17	12	29
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9	20	29
18	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAHA	17	13	30
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	21	35
20	DINAS PENDIDIKAN	912	1502	2414
21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	39	7	46
22	DINAS PERHUBUNGAN	38	9	47
23	DINAS PERIKANAN	21	9	30
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	12	16
25	DINAS PERTANIAN	64	48	112
26	DINAS SOSIAL	11	15	26
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	17	21	38
28	INSPEKTORAT	19	17	36
29	KECAMATAN ANTANG KALANG	9	3	12
30	KECAMATAN BAAMANG	26	25	51
31	KECAMATAN BUKIT SANTUAI	10		10
32	KECAMATAN CEMPAGA	13	3	16
33	KECAMATAN CEMPAGA HULU	6	3	9
34	KECAMATAN KOTA BESI	19	4	23
35	KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG	29	17	46
36	KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN	15	4	19
37	KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA	9	4	13
38	KECAMATAN MENTAYA HULU	14	3	17
39	KECAMATAN PARENGGEAN	16	1	17
40	KECAMATAN PULAU HANAUT	9	3	12
41	KECAMATAN SERANAU	13	5	18



NO	UNIT ORGANISASI/ SOPD	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
42	KECAMATAN TELAGA ANTANG	10	2	12
43	KECAMATAN TELAWANG	9	2	11
44	KECAMATAN TELUK SAMPIT	8	1	9
45	KECAMATAN TUALAN HULU	13	1	14
46	RSUD Dr. Murjani	142	299	441
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45	14	59
48	SEKRETARIAT DAERAH	71	48	119
49	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	22	12	34
50	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	1	-	1
51	BADAN PENGAWAS PEMILU	1	-	1
TOTAL		2213	2934	5147

Sumber data dari BKPSDM tahun 2023

2. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kabupaten Kotawaringin Timur adalah daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Tugas Pokok Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tugas pokok Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas - tugas desentralisasi di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Tugas pokok tersebut dijabarkan lagi ke dalam tugas pokok Perangkat Daerah (PD), dengan tujuan untuk mengakomodir dan merealisasi berbagai aspirasi yang representatif, transparansi, profesional, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan / akuntabel.

Tugas pokok Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

a) **Sekretariat Daerah (SETDA).**

Sekretariat Daerah (SETDA), mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah.

b) **Sekretariat DPRD (SETWAN).**

Sekretariat DPRD (SETWAN), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

c) **Inspektorat Kabupaten.**

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

d) **Dinas Daerah.**



Secara umum, Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tugasnya masing - masing, sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

e) **Badan Daerah.**

Secara umum, Badan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai bidang tugasnya masing - masing.

f) **Kecamatan.**

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

g) **Kelurahan.**

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Isu - Isu Strategis (*Strategic Issue*).

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur (Tahun 2021 - 2026) memiliki nilai strategis sebagai dokumen perencanaan. RPJMD merupakan pedoman atau acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) masing - masing. RPJMD bersifat indikatif dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kotawaringin Timur terpilih.

Isu strategis adalah permasalahan pembangunan yang dijadikan prioritas Pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang, Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya :

1. Isu strategis dan Sasaran serta Kebijakan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024;
2. Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah terpilih;
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lain yang mempengaruhi Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Isu strategis dalam rencana tata ruang yang berlaku dan mempengaruhi Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
 - a. RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, periode 5 tahun terakhir.
 - b. Isu Strategis yang diangkat dari situasi dan kondisi identifikasi permasalahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014.
6. Isu strategis yang dirumuskan dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
7. Janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Isu strategis yang diangkat dalam RPJMD ini berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :



1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”

2. Misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu:

- Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
- Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)
- Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya

3. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Adapun tujuan pembangunan daerah adalah:

- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah.
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Daerah.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup



B. Perjanjian Kinerja

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur dan Perubahannya Tahun 2024, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang ditandatangani Bupati Kotawaringin Timur. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	53,70
		2. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	49,17
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	1. Persentase layanan angkutan darat, laut dan udara	%	55
		2. Angka kecelakaan lalu lintas darat	Jumlah	102
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar	1. Persentase rumah tinggal bersanitasi (layak)	%	83,00
		2. Persentase rumah tinggal bersanitasi (aman)	%	10,00
		3. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	68,59
		4. Persentase penduduk berakses air minum	%	100,00
		5. Rasio rumah layak huni	%	0,8735
		6. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	66,67
4.	Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	%	85,81
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,41
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49
6.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,11
7.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan keluarga	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,33
		2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	34,45
8.	Meningkatnya daya saing daerah	1. Produktivitas Total Daerah	Juta	131,28
		2. Angka Kriminalitas Yang Tertangani	permiriad (per sepuluh ribu)	4,81
9.	Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga	1. Persentase wirausaha muda	%	45,00
		2. Jumlah prestasi olahraga	Cabor	24,00



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
10.	Meningkatnya keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	%	80,95
11.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	22,84
12.	Meningkatnya aktivitas ekonomi rakyat	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	91,00
13.	Menguatnya sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,75
14.	Meningkatnya investasi di daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	1.654.710.332.625,00
15.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Baik
16.	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini BPK	kriteria	WTP
		Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	%	92
		3. Nilai SAKIP	kriteria	B
		4. Nilai LPPD	kriteria	Tinggi
17.	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	2,80
18.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	18,00
19.	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	8
20	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	1. Indeks Kualitas Air	indeks	69,4
		2. Indeks Kualitas Udara	indeks	89,21
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	54,55
		4. Timbulan Sampah yang Ditangani	%	65,00
21	Meningkatnya kualitas ruang publik	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	7,1
22.	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100,00
		2. Persentase penurunan jumlah titik api (hot spot)	%	100,00
23.	Meningkatnya jumlah karya dan cagar budaya yang dikelola	Presentase Benda, Situs, Seni dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25,71

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0390/Huk-ORG/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	53,70
2.	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	49,17
3.	Persentase layanan angkutan darat, laut dan udara	%	55
4.	Angka kecelakaan lalu lintas darat	Jumlah	102
5.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (layak)	%	83,00
6.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (aman)	%	10,00
7.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	68,59
8.	Persentase penduduk berakses air minum	%	100,00
9.	Rasio rumah layak huni	%	0,8735
10.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	66,67
11.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	85,81
12.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,41
13.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49
14.	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,11
15.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,33
16.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	34,45
17.	Produktivitas Total Daerah	Juta	131,28
18.	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	permiriad (per sepuluh ribu)	4,81
19.	Persentase wirausaha muda	%	45,00
20.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	24,00
21.	Indeks Ketahanan Pangan	%	80,95
22.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	22,84
23.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	91,00
24.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,75
25.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	1.654.710.332.625,00
26.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Baik
27.	Opini BPK	kriteria	WTP
28.	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	%	92
29.	Nilai SAKIP	kriteria	B
30.	Nilai LPPD	kriteria	Tinggi
31.	Indeks SPBE	Indeks	2,80
32.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	18,00
33.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	8
34.	Indeks Kualitas Air	indeks	69,4
35.	Indeks Kualitas Udara	indeks	89,21
36.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	54,55
37.	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	65,00
38.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	7,1
39.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100,00
40.	Persentase penurunan jumlah titik api (hot spot)	%	100,00
41.	Presentase Benda, Situs, Seni dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25,71



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Perorangan, badan hukum atau pimpinan organisasi atau pimpinan kolektif, berkewajiban menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada berbagai pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, selaku pemegang amanah, berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam laporan kinerja tersebut tergambar tingkat pencapaian target masing - masing indikator sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Tahun 2021 - 2026, RKPD Tahun 2023 dan PK Tahun 2024.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. Pada Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

No	Rata-Rata Capaian	Kategori/Interpretasi
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber Data : Permendagri No.86 Tahun 2017 hal 494

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang terdiri dari 23 sasaran.

Hasil Pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis dan 41 (empat puluh satu) Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat dirincikan bahwa dari 23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis, 18 (dua puluh) Sasaran Strategis yang tercapai dengan pencapaian $\geq 91\%$, sedangkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan pencapaian $\leq 90\%$ dan 3



(tiga) sasaran strategis dengan pencapaian $\leq 75\%$. Total rata - rata pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 adalah 150,00% atau masuk predikat Sangat Tinggi.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya total pencapaian sasaran strategis tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan dimana sebelumnya capaian sasaran strategis tahun 2021 adalah 112,92% dan capaian sasaran strategis tahun 2022 adalah 117,36% dan capaian sasaran strategis tahun 2023 adalah 150,21%

Pencapaian indikator kinerja tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dirincikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	53,70	61,14	113,85
		2.	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	49,17	51,14	104,01
Rata – rata capaian							108,93
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	1.	Persentase layanan angkutan darat, laut dan udara	%	55	101	183,64
		2.	Angka kecelakaan lalu lintas darat	Jumlah	102	218	213,73
Rata – rata capaian							198,68
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar	1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (layak)	%	83,00	70,47	84,90
		2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (aman)	%	10,00	1,9	19,00
		3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	68,59	60,14	87,68
		4.	Persentase penduduk berakses air minum	%	100,00	60,51	60,51
		5.	Rasio rumah layak huni	%	0,8735	0,9000	103,03
		6.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	66,67	40,95	61,42
Rata – rata capaian							69,42
4.	Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi		%	85,81	96,22	112,13
Rata – rata capaian							112,13
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,41	8,48	100,83
		2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,53	100,30
Rata – rata capaian							100,56
6.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup		Tahun	70,11	70,51	100,57
Rata – rata capaian							100,57
7.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan keluarga	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,33	82,52	93,42
		2.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	34,45	32,37	93,96



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7
Rata – rata capaian							93,69
8.	Meningkatnya daya saing daerah	1.	Produktivitas Total Daerah	Juta	131,28	96,11	73,21
		2.	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	permiriad (per sepuluh ribu)	4,81	4,29	89,19
Rata – rata capaian							81,20
9.	Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga	1.	Persentase wirausaha muda	%	45,00	45,09	100,20
		2.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	24,00	21	87,50
Rata – rata capaian							93,85
10.	Meningkatnya keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	Indeks Ketahanan Pangan		%	80,95	73,03	90,22
Rata – rata capaian							90,22
11.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		%	22,84	21,48	94,05
Rata – rata capaian							94,05
12.	Meningkatnya aktivitas ekonomi rakyat	Persentase Usaha Mikro dan Kecil		%	91,00	68	74,73
Rata – rata capaian							74,73
13.	Menguatnya sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		%	1,75	2,44	139,43
Rata – rata capaian							139,43
14.	Meningkatnya investasi di daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		Milyar Rupiah	1.654.710.332.625,00	2.257.323.060.000,00	136,42
Rata – rata capaian							136,42
15.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	Baik	Baik	100
Rata – rata capaian							100
16.	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.	Opini BPK	kriteria	WTP	WTP	100
		2.	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	%	92	85	92,39
		3.	Nilai SAKIP	kriteria	B	B	100
		4.	Nilai LPPD	kriteria	Tinggi	Tinggi	100
Rata – rata capaian							98,10
17.	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE		Indeks	2,80	3,22	115,00
Rata – rata capaian							115,00
18.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		%	18,00	13,01	72,28
Rata – rata capaian							72,28
19.	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Desa Mandiri		Desa	8	72	900,00
Rata – rata capaian							900,00
20	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	1.	Indeks Kualitas Air	indeks	69,4	46,00	66,28
		2.	Indeks Kualitas Udara	indeks	89,21	94,67	106,12
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	54,55	51,21	93,88
		4.	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	65,00	94,30	145,08
Rata – rata capaian							102,84



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
21	Meningkatnya kualitas ruang publik	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	7,1	8,47	119,30
Rata – rata capaian						119,30
22.	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100,00	100,00	100,00
		2. Persentase penurunan jumlah titik api (hot spot)	%	100,00	100,00	100,00
Rata – rata capaian						100,00
23.	Meningkatnya jumlah karya dan cagar budaya yang dikelola	Presentase Benda, Situs, Seni dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25,71	89,60	348,50
Rata – rata capaian						348,50
Capaian Rata-Rata Sasaran						150,00

Tabel 3.2
Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata – rata capaian (%)	≤50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤100%
1.	Meningkatnya kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	2	108,93					sangat tinggi
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	2	198,68					sangat tinggi
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar	6	69,42			sedang		
4.	Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi	1	112,13					sangat tinggi
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	2	100,56					sangat tinggi
6.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	100,57					sangat tinggi
7.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan keluarga	2	93,69					sangat tinggi
8.	Meningkatnya daya saing daerah	2	81,2				tinggi	
9.	Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga	2	93,85					sangat tinggi
10.	Meningkatnya keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	1	90,22				tinggi	
11.	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	94,05					sangat tinggi
12.	Meningkatnya aktivitas ekonomi rakyat	1	74,73			Sedang		
13.	Menguatnya sektor pariwisata	1	139,43					sangat tinggi
14.	Meningkatnya investasi di daerah	1	136,42					sangat tinggi
15.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100					sangat tinggi
16.	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	98,10					sangat tinggi



No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata – rata capaian (%)	≤50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤100%
17.	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1	115					sangat tinggi
18.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1	72,28			sedang		
19.	Meningkatnya kemandirian desa	1	900					sangat tinggi
20.	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	4	102,84					sangat tinggi
21.	Meningkatnya kualitas ruang publik	1	119,3					sangat tinggi
22.	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	2	100					sangat tinggi
23.	Meningkatnya jumlah karya dan cagar budaya yang dikelola	1	348,5					sangat tinggi
JUMLAH		41	150,00	-	-	3	2	18

Berdasarkan kedua tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja 91% ≤100% kategori “sangat tinggi” sebanyak 18 sasaran, atau 78,26%;
- Capaian kinerja 76% ≤ 90% kategori “tinggi” sebanyak 2 sasaran, atau 8,70%;
- Capaian kinerja 66% ≤ 75% kategori “sedang” sebanyak 3 sasaran, atau 13,04%;
- Capaian kinerja 51% ≤ 65% kategori “rendah” tidak ada;
- Capaian kinerja ≤50% kategori “sangat rendah” tidak ada.

Pencapaian kinerja 23 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Nilai Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1.	Sangat Tinggi	18	78,26
2.	Tinggi	2	8,70
3.	Sedang	3	13,04
4.	Rendah	-	
5.	Sangat Rendah	-	-
Jumlah		23	100

Selanjutnya hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.4 Rekapitulasi Capaian IKU

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	3	4	5	6	7
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	53,70	61,14	113,85
2.	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	49,17	51,14	104,01
3.	Persentase layanan angkutan darat, laut dan udara	%	55	101	183,64
4.	Angka kecelakaan lalu lintas darat	Jumlah	102	218	213,73
5.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (layak)	%	83,00	70,47	84,90
6.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (aman)	%	10,00	1,72	17,20
7.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	68,59	60,14	87,68
8.	Persentase penduduk berakses air minum	%	100,00	60,51	60,51
9.	Rasio rumah layak huni	%	0,8735	0,9000	103,03
10.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	66,67	40,95	61,42
11.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	85,81	96,22	112,13
12.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,41	8,48	100,83
13.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,53	100,30
14.	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,11	70,51	100,57
15.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,33	82,52	93,42
16.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	34,45	32,37	93,96
17.	Produktivitas Total Daerah	Juta	131,28	96,11	73,21
18.	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	permiriad (per sepuluh ribu)	4,81	4,29	89,19
19.	Persentase wirausaha muda	%	45,00	45,09	100,20
20.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	24,00	21	87,50
21.	Indeks Ketahanan Pangan	%	80,95	73,03	90,22
22.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	22,84	21,48	94,05
23.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	91,00	68	74,73
24.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,75	2,44	139,43
25.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	1.654.710.332.625,00	2.257.323.060.000,00	136,42
26.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Baik	Baik	100
27.	Opini BPK	kriteria	WTP	WTP	100
28.	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	%	92	85	92,39
29.	Nilai SAKIP	kriteria	B	B	100
30.	Nilai LPPD	kriteria	Tinggi	Tinggi	100
31.	Indeks SPBE	Indeks	2,80	3,22	115,00
32.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	18,00	13,01	72,28
33.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	8	72	900,00
34.	Indeks Kualitas Air	indeks	69,4	46,00	66,28
35.	Indeks Kualitas Udara	indeks	89,21	94,67	106,12
36.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	54,55	51,21	93,88
37.	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	65,00	94,30	145,08



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	3	4	5	6	7
38.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	7,1	8,47	119,30
39.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100,00	100,00	100,00
40.	Persentase penurunan jumlah titik api (hot spot)	%	100,00	100,00	100,00
41.	Persentase Benda, Situs, Seni dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25,71	89,60	348,50

B. ANALISIS PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

Untuk menggali dan mendalami sebab - sebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran kinerja dan indikatornya, perlu dilakukan evaluasi lebih cermat sebagai berikut :

Sasaran Ke-1 : Meningkatnya kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten" dengan indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) dan Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik mencapai mencapai **108,93%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	53,70	61,14	113,85	108,60	113,43
2.	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	49,17	51,14	104,01	103,69	102,97
Rata -rata capaian					108,93	106,15	108,20

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

- Panjang jalan yang memenuhi kondisi jalan adalah jumlah ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang telah memenuhi kriteria kondisi jalan baik dan sedang pada tahun 2024. Bertambahnya panjang jalan dalam kondisi baik tersebut merupakan prestasi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pencapaian indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) tahun 2024 terealisasi sebesar 61,14% dari target sebesar 53,70% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 113,85%



JALAN DAN JEMBATAN

Sumber Data : Dinas PUPRPRKP Kab. Kotim



- a. Di Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi peningkatan pada pembangunan infrastruktur jalan khususnya pada pembangunan jembatan. Pencapaian indikator Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2024 terealisasi sebesar 49,17% dari target sebesar 49,17% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 104,01%

JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE

Sumber Data : Dinas PUPRPRKP Kab. Kotim





Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	52,07	53,70	61,14	113,85	55,52	110,12
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	48,50	49,17	51,14	104,01	49,84	102,61

Tabel 3.7 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	50,93	55,51	57,19	60,29	61,14	55,52
2.	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	46,82	50,30	50,29	50,29	51,14	49,84

Sasaran "Meningkatnya kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.8 Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	160.122.876.470	154.211.328.501	96,31

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yg telah dilakukan

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran "Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten" adalah :

1. Dalam rangka mewujudkan visi " Terwujudnya Kab. Kotim yang mandiri, maju dan sejahtera" telah dituangkan ke dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 melalui misi ke 1 "Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan" tujuannya Peningkatan kualitas infrastruktur daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten, maka porsi anggaran yang dialokasikan untuk program yang mendukung perwujudan sasaran tersebut mencukupi
2. Program / kegiatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan direncanakan secara matang mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
3. Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada UKPBJ berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
4. Manajemen proyek yang baik
5. Dukungan dari masyarakat sekitar



Sasaran Ke-2 : Meningkatnya kualitas layanan transportasi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas layanan transportasi" dengan indikator Persentase layanan angkutan darat, laut dan udara dan Angka kecelakaan lalu lintas darat mencapai mencapai **198,68%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**".

Data capaian kinerja sasaran 2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9 Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Persentase layanan angkutan darat, laut dan udara	%	55	101	183,64	96,17	100,00
2.	Angka kecelakaan lalu lintas darat	Jumlah	102	218	213,73	119,61	107,27
Rata -rata capaian					198,68	122,39	103,64

Pencapaian indikator Persentase layanan angkutan darat, laut dan udara tahun 2024 terealisasi 101% dari target sebesar 55% sehingga persentase capaian sebesar 183,64%

a. Persentase layanan angkutan darat, laut dan udara

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023	
			Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
1.	Persentase Layanan Angkutan	%	44	45,2	44	45,2	44	45,2
	Darat	%	46	48	46	48	46	48
	Laut/Sungai	%	43	44	43	44	43	44
	Udara	%	43	43,5	43	43,5	43	43,5
	Rata - rata	%	44	45,2	44	45,2	44	45,2

b. Angka kecelakaan lalu lintas darat

Pencapaian indikator Angka kecelakaan lalu lintas darat tahun 2024 terealisasi sebesar 218 dari target sebesar 102 sehingga persentase capaian sebesar 213,73%

Faktor faktor yang mempengaruhi penurunan angka kecelakaan :

1. Melaksanakan Sosialisasi Tertib Lalu lintas dan *Safety Riding* pada pengendara yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu jalan di daerah rawan kecelakaan
3. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan berupa Alat Penerangan Jalan (APJ) di sepanjang ruas ruas jalan kabupaten Kotawaringin Timur

**KEGIATAN PENANGAN PJU TAHUN 2020 - 2024
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



Kegiatan Pengadaan PJU Tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	PJU	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nyala/Hidup	1466	941	1132	1810	608
2	Mati	85	1128	1370	1057	1057
Total		1551	2069	2502	2867	1665

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Persentase layanan angkutan darat, laut dan udara	44,00	55	101	183,64	65,00	155,38
		Angka kecelakaan lalu lintas darat	125	102	218	213,73	83	262,65

Tabel 3.11 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Persentase layanan angkutan darat, laut dan udara	%	44,00	45,20	45,20	50	101	65
2.	Angka kecelakaan lalu lintas darat	Jumlah	130	88	47	118	218	83

Sasaran " Meningkatkan kualitas layanan transportasi" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :



Tabel 3.12 Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ	14.046.617.731	13.854.991.797	98,64
2	Program pengelolaan pelayaran	45.120.000,00	44.960.900,00	99,65

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ” Meningkatkan kualitas layanan transportasi” adalah :

1. Tersedianya dana anggaran untuk kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
2. Terciptanya peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) Pegawai Dinas Perhubungan
3. Terjalinya koordinasi dengan instansi terkait ,Satlantas dan Satpol PP
4. Terlaksananya sosialisasi tertib lalu lintas dan safety riding pada pengendara yang ada di Kab. Kotim
5. Terpasangnya Fasilitas keselamatan jalan berupa rambu rambu jalan di daerah daerah rawan kecelakaan
6. Terpasangnya fasilitas keselamatan jalan berupa Alat Penerang Jalan (APJ) di sepanjang ruas ruas jalan Kabupaten Kotawaringin Timur

Sasaran Ke-3 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ” Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar” dengan 6 (enam) indikator kinerja mencapai **68,00%** dan termasuk predikat ”**Sedang**”. Data capaian kinerja sasaran 3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13 Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (layak)	%	83,00	70,47	84,90	87,15	93,26
2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (aman)	%	10,00	1,9	19,00	31,54	21,00
3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	68,59	60,14	87,68	60,33	102,86
4.	Persentase penduduk berakses air minum	%	100,00	60,51	60,51	29,28	62,85
5.	Rasio rumah layak huni	%	0,8735	0,9000	103,03	87,92	78,17
6.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	66,67	40,95	61,42	74,77	49,84
Rata -rata capaian					69,42	61,83	68,00

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Persentase rumah tinggal bersanitasi (layak) terealisasi sebesar 70,47% dari target 83,00% dengan capaian sebesar 84,90%
- b. Persentase rumah tinggal bersanitasi (aman) terealisasi sebesar 1,9% dari target 10,00% dengan capaian 19,00%. Hal ini disebabkan masih terbatasnya alokasi dana anggaran pada kegiatan ini.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam meningkatkan rumah tinggal bersanitasi aman, perlu dilakukan :

- Mengajukan penambahan anggaran kegiatan baik melalui APBD maupun dana dari Pemerintah Pusat (DAK)
- Sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik

Pembangunan tangki septik individual Desa Bapanggang Raya



Pembangunan tangki septik individual Kelurahan Tanah Mas



Peningkatan Pembangunan Sanitasi Layak dan Aman

- c. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat terealisasi sebesar 60,14% dari target 68,59% dengan capaian 87,68%.

JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE

Sumber Data : Dinas PUPRPRKP Kab. Kotim



- d. Persentase penduduk berakses air minum terealisasi sebesar 60,51% dari target 100,00% dengan capaian sebesar 60,51%.

AIR MINUM

Sumber Data : Dinas PUPRPRKP Kab. Kotim



- e. Rasio rumah layak huni terealisasi sebesar 0,9000% dari target 0,8735% dengan capaian sebesar 103,03%.



Hal ini disebabkan masih terbatasnya alokasi dana anggaran pada kegiatan ini. Langkah yang akan dilakukan adalah dengan melakukan penguatan data sebagai dasar usulan ke Kementerian (program DAK) dan penyiapan dana pendamping dari Pemerintah Daerah agar dapat mencapai target dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Sumber Data : Dinas PUPRPRKP Kab. Kotim



- Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan terealisasi sebesar 40,95% dari target 66,67% dengan capaian 61,42%. Dengan adanya program penanganan rumah kumuh, dapat membantu mengurangi pemukiman kumuh di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berhasilnya capaian indikator Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan disebabkan oleh terlaksananya Program DAK Perumahan sesuai rencana kerja

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar	Persentase rumah tinggal bersanitasi (layak)	67,30	83,00	70,47	84,90	94,80	74,34
		Persentase rumah tinggal bersanitasi (aman)	6,39	10,00	1,9	19,00	13,62	12,63
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	63,00	68,59	60,14	87,68	54,57	110,21
		Persentase penduduk berakses air minum	88,83	100,00	60,51	60,51	100,00	60,51
		Rasio rumah layak huni	0,6172	0,8735	0,9000	103,03	1,0000	0,01
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	16,67	66,67	40,95	61,42	100,00	40,95



Tabel 3.15 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (layak)	%	N/A	45,72	62,05	71,90	70,47	94,80
2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (aman)	%	N/A	0,82	2,05	1,72	1,9	13,62
3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	N/A	37,25	37,84	61,88	60,14	54,57
4.	Persentase penduduk berakses air minum	%	N/A	26,76	27,10	60,51	60,51	100,00
5.	Rasio rumah layak huni	%	N/A	0,1892	0,62	0,62	0,9000	1,0000
6.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	N/A	15,23	24,92	24,92	40,95	100,00

Sasaran ” Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.16 Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	175.955.693.402,00	148.602.718.316,00	84,45
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	700.000.000,00	395.439.635,00	56,49
3	Program Kawasan Permukiman	313.610.000,00	302.590.595,00	96,49
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.938.096.000,00	1.861.819.905	96,06

Faktor – faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya pencapaian sasaran ”Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar” adalah :

- Keterbatasan anggaran
- Perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat
- Perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga dan mengelola kebersihan drainase lingkungan sekitar tempat tinggal
- Banyaknya saluran drainase dan gorong-gorong yang rusak sehingga berkurangnya fungsi saluran drainase dan gorong-gorong
- Kapasitas IPA (Instalasi Pengelolaan Air) Kurang besar

- Belum lengkapnya data kegiatan untuk dasar usulan ke Kementerian dan penyiapan dana pendamping

Sasaran Ke-4 : Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi" dengan indikator kinerja cakupan layanan telekomunikasi mencapai **112,13%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 4 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.17 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	85,81	96,22	112,13	156,76	96,90
Rata -rata capaian					112,13	138,19	96,90

Pencapaian Sasaran ini diperoleh melalui komunikasi dan koordinasi secara intensif kepada pihak penyedia jaringan telekomunikasi seluler serta pendampingan secara efektif kepada pihak desa agar mengoptimalkan penggunaan dana desanya untuk penyediaan sarana internet desa.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sumber Data : Dinas Kominfo Kab. Kotim

JUMLAH DESA YANG SUDAH TERJANGKAU SIGNAL TELEKOMUNIKASI / AKSES INTERNET
DI KAB. KOTIM TAHUN 2022 - 2024





Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	50,00	85,81	96,22	112,13	93,00	103,46

Tabel 3.19 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	71,35	78,38	79,46	79,46	96,22	93,00

Sasaran " Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.20 Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi	4.964.729.850,00	4.778.174.810,00	96,24

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran " Meningkatkan Cakupan Jaringan Telekomunikasi" adalah :

- Dukungan dan sinkronisasi dengan program-program pimpinan.
- Upaya konsistensi di dalam implementasi program-program kegiatan antara perencanaan strategis dengan perencanaan kebijakan/anggaran.
- Dukungan partisipasi Pemerintah Desa dengan sewa teknologi jaringan internet VSAT melalui dana desa sehingga dapat membantu akses komunikasi data/suara/video melalui aplikasi Whatsapp maupun mesengger FB.

Kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran " Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi" adalah :

- Belum adanya legalisasi aset tanah yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai aset desa menyebabkan terkendalanya tindak lanjut proses pengajuan PBG nya sehingga mempengaruhi aktifasi perangkat radio/telekomunikasi dari operator seluler.
- Belum terjalinnya komunikasi yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan warganya sehingga memperlambat proses instalasi menara telekomunikasi.



- Masyarakat masih kurang pemahaman tentang arti daerah blankspot, meskipun beberapa wilayahnya sudah tercover sebaran sinyal 4G namun karena kekuatannya terbatas yang dipengaruhi oleh jarak dari tower, adanya halangan/hambatan pancaran sinyal seperti rimbunnya pepohonan yang tinggi, terhalang perbukitan sehingga mereka beranggapan daerahnya masih blankspot.
- Beberapa desa yang dibangun tower GSM 4G tidak menggunakan perangkat relay radio link karena faktor geografis dan jangkauan (*radius coverage*) yang tidak memungkinkan diambil dari tower terdekat, sehingga alternatifnya menggunakan perangkat parabola VSAT yang memiliki keterbatasan bandwidth dan sangat dipengaruhi faktor cuaca dalam penggunaannya.

Sasaran Ke-5 : Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat" dengan indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah mencapai **100,56%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 5 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21 Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,41	8,48	100,83	98,91	101,21
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,53	100,30	97,79	100,00
Rata -rata capaian					100,56	99,48	100,61

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

1. Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2024 ditargetkan 8,41 Tahun. Namun realisasi angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,48 Tahun. Artinya rata-rata lama sekolah hanya sampai tingkat SMP kelas 8.
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Target Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 13,49 tahun dan realisasinya 13,53 tahun. Artinya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai jenjang SLTA.

Tabel 3.22 Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun	Harapan Lama Sekolah	Rata – rata Lama Sekolah
2018	12,68	7,90
2019	12,69	8,12
2020	12,84	8,13
2021	12,85	8,15
2022	12,86	8,16
2023	13,15	8,35
2024	13,53	8,48

Sumber : Disdik Kotim 2024



Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	8,16	8,41	8,48	100,83	8,59	97,21
		Harapan Lama Sekolah	12,97	13,49	13,53	100,30	13,84	95,01

Tabel 3.24 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,13	8,15	8,16	8,35	8,48	8,59
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,84	12,85	12,86	13,15	13,53	13,84

Sasaran "Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.25 Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	14.928.825.670,00	8.074.326.914,00	54,09
2.	Program Pendidik Anak Usia Dini	95.863.658.368,00	33.550.353.434,00	35,00

Faktor - faktor yang mempengaruhi tercapainya pencapaian sasaran "Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat" adalah :

1. Penyediaan sekolah oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan sarana prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jumlah sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. SD/MI berjumlah 371 sekolah, terdiri 311 sekolah negeri dan 60 sekolah swasta. Persentase jumlah sekolah negeri lebih banyak dari pada sekolah swasta yaitu sebesar 83,83%, sedangkan persentase sekolah swasta yaitu 16,17%. Dari sisi peserta didik, persentase sekolah swasta mencapai 24,45% dan persentase sekolah negeri mencapai 75,55%. Jumlah peserta didik sekolah negeri lebih banyak daripada sekolah swasta.
 - b. SMP/MTs berjumlah 109, terdiri dari 77 sekolah negeri dan 32 sekolah swasta. Persentase jumlah sekolah swasta lebih besar dari pada sekolah negeri yaitu sebesar 70,64%, sedangkan persentase sekolah negeri yaitu 29,36%. Jika dilihat dari persentase jumlah peserta didik, sejatinya peserta didik di sekolah negeri lebih banyak



dari pada sekolah swasta yaitu sebesar 73,06% sedangkan jumlah peserta didik swasta mencapai 26,94%.

2. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dari dana APBN maupun APBD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs juga merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dana BOS tersebut digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam rangka mewujudkan 8 standar pendidikan nasional.
3. Penyediaan bantuan Pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu mulai dari jenjang SD dan SMP. Peserta didik jenjang SD total penerima sebanyak 15.575 siswa sedangkan bagi peserta didik jenjang SMP total penerima sebanyak 7.316 siswa.



Sasaran Ke-6 : Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat" dengan indikator kinerja Umur harapan hidup mencapai **105,57%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 6 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.26 Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,11	70,51	100,57	100,27	105,97
Rata -rata capaian					100,57	100,27	105,97

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Timur

Umur harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Data harapan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur ditunjukkan dalam umur harapan hidup yang berkisar pada rata-rata 69 tahun. Indikator Umur Harapan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai **100,57%** dari target 70,11 tahun dan terealisasi 70,51 tahun. Hingga Tahun 2024 umur harapan hidup terus meningkat

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	69,89	70,11	70,51	100,57	70,26	100,36

Tabel 3.28 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Umur Harapan Hidup	Tahun	69,85	69,90	70,15	74,22	70,51	70,26



Sasaran "Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.29 Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	175.955.693.402,00	148.602.718.316,00	84,45
2	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	32.337.729.152,00	29.105.766.221,00	90,01
3	program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	530.657.000,00	392.664.349,00	74,00
4	program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.168.760.800,00	858.345.600,00	73,44

Faktor - faktor yang mempengaruhi tercapainya pencapaian sasaran " Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat" adalah :

1. Tersedianya anggaran, sarana kesehatan yang memadai, dan sumber daya yang berkualitas.
2. Pemenuhan regulasi standar bangunan Puskesmas serta pemenuhan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD.
3. Tersedianya 21 (dua puluh satu) Puskesmas 147 (seratus empat puluh tujuh) Pustu dan 90 (sembilan puluh) Poskesdes.
4. Tersedianya 7 (tujuh) Puskesmas Rawat Inap yang mampu menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan 1 (satu) Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, termasuk COVID-19.
5. Terdapat 2 (dua) Rumah Sakit Pratama yaitu RS Pratama Parenggean dan RS Pratama Samuda.
6. Adanya regulasi daerah yang mengatur tentang Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) yaitu Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
7. Adanya pokja sanitasi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang melakukan perencanaan, pelaksanaan kegiatan sanitasi.
8. Adanya Tim Pengawas Makanan yang Terpadu Tingkat Kabupaten. Terutama pada masa pandemi bagi usaha jasadoga dan restoran agar menerapkan protokol kesehatan.
9. Adanya kesadaran masyarakat umum dan institusi untuk melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) secara mandiri.
10. Adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan dan promosi kesehatan pada Puskesmas sebagai ujung pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.
11. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.



12. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
13. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan 5M (Cuci Tangan Pakai Sabun Memakai Masker dan Jaga Jarak minimal 1,5 m, menghindari kerumunan dan mengurangi bepergian).
14. Adanya kesadaran pengelola fasilitas umum di masa pandemi yang sudah menerapkan perilaku protokol Kesehatan.
15. Penerapan Akreditasi dan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas yang telah dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan dengan hasil sebagai berikut:
 - a) RSUD Dr. Murjani Sampit memperoleh akreditasi kategori “Utama”
 - b) Akreditasi terhadap 7 (tujuh) Puskesmas, yang menghasilkan kategori:
 - 1) Puskesmas Bagendang kategori Madya,
 - 2) Puskesmas Baamang 2 kategori Utama,
 - 3) Puskesmas Cempaka Mulia kategori Madya,
 - 4) Puskesmas Sebabi kategori Madya,
 - 5) Puskesmas Kuala Kuayan kategori Utama,
 - 6) Puskesmas Tumbang Sangai kategori Utama,
 - 7) Puskesmas Tumbang Kalang kategori Madya
16. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Kesehatan Reproduksi, Gerakan Masyarakat Cerdas memilih Obat (Gema Cermat), Gerakan Rumah Tangga Tidak Merokok, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta sosialisasi hidup sehat dengan olahraga.
17. Dalam rangka penanganan Covid-19 di Puskesmas Ujung Pandaran menerapkan inovasi SIMVAK (Skrining PTM Melalui Vaksinasi), setiap yang divaksinasi diskurasi risiko penyakit tidak menularnya.
18. Pada Puskesmas Ujung Pandaran juga ada inovasi Jekmil (Ojek Ibu Hamil), Ibu hamil diantarkan cek ke dokter dengan biaya dari desa didampingi petugas Kesehatan.
19. Inovasi Posbindu yaitu Posbindu mobile, dalam 1 triwulan, 1 bulan pelayanan statis, 2 bulan pelayanan mobile di RT-RT untuk meningkatkan capaian SPM skrining usia produktif dan lansia.
20. Penggerakan Masyarakat:
 - a. Hari Cuci Tangan Sedunia dg kegiatan penyuluhan, cuci tangan pakai sabun & makan buah bersama di 18 Puskesmas



- b. Hari AIDS dg tema Pekan Peduli HIV/AIDS & Kesehatan Reproduksi Remaja dg kegiatan penyuluhan HIV/AIDS & Kesehatan Reproduksi Remaja, pembacaan komitmen bersama dan penandatanganan komitmen bersama di 21 Puskesmas
- c. Aksi Masyarakat dalam upaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kecamatan Parenggean

NAMA POSBINDU SE- KAB KOTIM TAHUN 2024

NO	PUSKESMAS	NAMA POSBINDU	NAMA DESA	JUMLAH POSBINDU
1	SAMUDA	1.SIRIH AYU	BASIRIH HULU DARAT	12
		2.MELATI 2	SAMUDA BESAR	
		3.SEHAT SEJAHTERA	JAYA KELAPA	
		4.SIRIH INDAH	BASIRIH HULU	
		5.MELATI 1	JAYA KARET BAWAH	
		6.TERATAI PUTIH	JAYA KARET DARAT	
		7.HARAPAN SEHAT	SAMUDA KECIL	
		8.SIJURA	SEI IJUM RAYA	
		9.KAMBOJA	SEBAMBAN	
		10.MAWAR	BASIRIH HILIR	
		11.SEROJA	SAMUDA KOTA	
		12.NUR AFAT	HANDIL SOHOR	
2	UJUNG PANDARAN	1.BASAWANG	BASAWANG	2
		2.DURRAHMAN	KUIN PERMAI	
3	BAPINANG	1.SEHAT SEJAHTERA	RAWA SARI	10
		2.MEKAR SARI	MAKARTI JAYA	
		3.KACA PIRING	HANAUT	
		4.SABAR MENANTI	BAPINANG HULU	
		5.NUSA INDAH	BAMADU	
		6.DELIMA	PENYAGUAN	
		7.PERMATA HATI	BABAUNG	
		8.HARAPAN BERSAMA	BAPINANG HILIR	
		9.HARAPAN KITA	BAPINANG HILIR DS KUTUK	
		10.SEHAT BERSAMA	BABIRAH	
4	BAGENDANG	1.BARIGAS	SUMBER MAKMUR	2
		2.PERMAI	BAGENDANG HILIR PERMAI	
5	KETAPANG 1	1.SAWAHAN	SAWAHAN	4
		2.SEHAT SEJAHTERA	MB HILIR	
		3.SMKN 4	MB HULU	
		4.SEHAT MAKMUR	SAWAHAN	
6	KETAPANG 2	1.TERATAI	MENTAWA BARU KETAPANG	9
		2.SAHABAT KITA	TELAGA BARU	
		3.BINA SEHAT	PELANGSIAN	
		4.SEHAT MANDIRI	EKA BAHURUI	
		5.SEHATI	PELANGSIAN	
		6.SEJAHTERA	BANGKUANG MAKMUR	
		7.TUNAS HARAPAN	BAPEANG	
		8.NANAS IV	MB HILIR	
		9.BINA BERSAMA	PELANGSIAN	
7	PASIR PUTIH	1.KHUSNUL KHOTIMAH	PERUM PENDAWA MB HULU	4
		2.MELATI	SAWIT RAYA	
		3.ANGGREK	JL.JEND SUDIRMAN KM.27	
		4.HARAPAN SEHAT	JL.JEND SUDIRMAN KM.12	
8	BAAMANG 1	1.DELIMA	BAAMANG HILIR	2
		2.AS SYIFA	BAAMANG TENGAH	
9	BAAMANG 2	1.KARYA BERSAMA	BAAMANG HULU	4
		2.TANAH MAS	TANAH MAS	
		3.BARIGAS INDAH	TINDUK	
		4.HORASA SEHAT	BAAMANG TENGAH	



NO	PUSKESMAS	NAMA POSBINDU	NAMA DESA	JUMLAH POSBINDU
10	MENTAYA SEBARANG	1.MELATI	MENTAYA SEBARANG	6
		2.MAWAR	SERAGAM JAYA	
		3.TUNAS HARAPAN	TERANTANG HILIR	
		4.GANEPO	GANEPO	
		5.BATUAH	BATUAH	
		6.TERANTANG	TERANTANG HULU	
11	SEBABI	1.BINA SEHAT	BIRU MAJU	7
		2.SEHAT SEJAHTERA	PENYANG	
		3.SEBAI	SEBAI	
		4.SEMOGA SEHAT	SUMBER MAKMUR	
		5.BARKEN	KENYALA	
		6.CAHAYA	TANAH PUTIH	
		7.DUKUH SATI	TANAH PUTIH	
12	KOTA BESI	1.KELUARGA SEJAHTERA	KB HILIR	11
		2.MAWAR	KB HULU	
		3.MANEKEN BAHAYAK	BAJARUM	
		4.BERENG BARIGAS	KANDAN	
		5.SEJAHTERA	UPT KANDAN	
		6.KAMBOJA 1	SIMPUR	
		7.TUMBUH SEJAHTERA	RASAU TUMBUH	
		8.ANGGREK	HANJALIPAN	
		9.FLAMBOYAN	PAMALIAN	
		10.HANIBUNG BARIGAS	CAMBA	
		11.MELATI	PALANGAN	
13	CEMPAKA MULIA	1.MATAHARI PAGI	RUBUNG BUYUNG	9
		2.SAKURA	JEMARAS	
		3.HARAPAN BERSAMA	SUNGAI PARING	
		4.HARAPAN IBU	CEMPAKA MULIA	
		5.KELUARGA SEJAHTERA	PATAI	
		6.TIMUR CERIA	CEMPAKA MULIA PUTIH	
		7.HARAPAN IBU	LUWUK BUNTER	
		8.SIAGA	LUWUK RANGGAN	
		9.KARIGAS	TELUK TEWAH	
14	PUNDU	1.PUNDU	PUNDU	9
		2.BUKIT BATU	BUKIT BATU	
		3.PELANTARAN	PELANTARAN	
		4.SUDAN	SUDAN	
		5.BUKIT RAYA	BUKIT RAYA	
		6.PANTAI HARAPAN	PANTAI HARAPAN	
		7.SUNGAI UBAR	SUNGAI UBAR MANDIRI	
		8.PARIT	PARIT	
		9.Tb.KOLING	Tb.KOLING	
15	PARENGGEAN 1	1.SEHAT MANDIRI	BUKIT HARAPAN	6
		2.HARAPAN SEHAT	SARI HARAPAN	
		3.SADARI	MENJALIN	
		4.SEHAT BERSAMA	KABUAU	
		5.JAYA SEJAHTERA	MEKAR JAYA	
		6.BAJARAU MANDIRI	BAJARAU	
16	PARENGGEAN 2	1.MUGI RAHAYU	KARANG TUNGGAL	5
		2.SENJA BAHAGIA	KARANG SARI	
		3.SIAGA SEHAT	SUMBER MAKMUR	
		4.ANGGREK	BANDAR AGUNG	
		5.KENANGA	BARINGIN TUNGGAL JAYA	
17	KUALA KUAYAN	1.BAHAGIA	TANGAR	18
		2.MELATI	BAAMPAH	
		3.KENANGA	BANTUR	
		4.SATIUNG	SATIUNG	
		5.MELATI	TANGKAROBAB	
		6.BARIGAS	PEMANTANG	
		7.SAPIRI	Tb.SAPIRI	
		8.BRINGIN	KUALA KUAYAN	



NO	PUSKESMAS	NAMA POSBINDU	NAMA DESA	JUMLAH POSBINDU
		9.MAWAR	KUALA KUAYAN	
		10.MELATI	KUALA KUAYAN	
		11.LATULIP	KAPUK	
		12.MELATI	TJ.JARIANGAU	
		13.CEMPAKA	BAWAN	
		14.ANGGREK	SANTILIK	
		15.LATULIP	PAHIRANGAN	
		16.P.DURIAN	PENDA DURIAN	
		17.KAMBOJA	KUALA KUAYAN	
		18.YAKIN SETIA	KAWAN BATU	
18	TUMBANG SANGAI	1.NUSA INDAH	AGUNG MULYA	6
		2.ANGGREK	BUANA MUSTIKA	
		3.RANTAU TAMPANG	RANTAU TAMPANG	
		4.MELATI	TRI BUANA	
		5.TUKANG LANGIT	TUKANG LANGIT	
		6.BUKIT INDAH	BUKIT INDAH	
19	TUMBANG KALANG	1.BAKAS LEWU	Tb. KALANG	9
		2.BAWI KAMELUH	Tb. KALANG	
		3.RIAK SANDUNG ANGUY	Tb.MANYA	
		4.RIAM MANGGAL	Tb. NGAHAN	
		5.BARIGAS	Tb. RAMEI	
		6.WARINGIN AGUNG	WARINGIN AGUNG	
		7.RIAM MANDANG	Tb.SEPAYANG	
		8.KULUK TELAWANG	KULUK TELAWANG	
		9.RIAK BATU SAMPAI	SUNGAI PURING	
20	TUMBANG PENYAHUAN	1.SEHAT BAHAGIA	Tb. GETAS	14
		2.MAJU BERSAMA	Tb. PENYAHUAN	
		3.AYO BERENG BARIGAS	Tb. SALUANG	
		4.HARAPAN ITAH	Tb. SAPIA	
		5.MELATI	Tb. KAMINTING	
		6.SEHAT BERSAMA	Tb. TILAP	
		7.INDAHG BARIGAS	Tb. PAYANG	
		8.BERENG BARIGAS	Tb. KANIA	
		9.HALUAN SEHAT	TANAH HALUAN	
		10.TEWEL BARA	TEWEL HARA	
		11.Tb.BATU	Tb. BATU	
		12.Tb.TAWAN	Tb. TAWAN	
		13.LUNUK BAGANTUNG	LUNUK BAGANTUNG	
		14.HANJAK TORUNG	Tb. TORUNG	
21	TUALAN HULU	1.BARIGAS	MERAH	11
		2.HARUM MANIS	MEKAR SARI	
		3.SEJAHTERA	DAMAR MAKMUR	
		4.KAYU AHUT	TANJUNG JORONG	
		5.PAMBELU ITAH	TUMBANG MUJAM	
		6.EKA BARIGAS	LUWUK SAMPUN	
		7.SINDEN ATIE	SUBUNGSU	
		8.HALAJUR BARIGAS	WONOSARI	
		9.SEHAT SENTOSA	BUKIT MAKMUR	
		10.PLAMBOYAN	CEMPAKA PUTIH	
		11.ANGGREK	JATIWARINGIN	



Sasaran Ke-7 : Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan keluarga

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan keluarga" dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) mencapai **93,69%** dan termasuk predikat "**tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 7 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.30 Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	88,33	82,52	93,42	100,86	85,54
2.	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	indeks	34,45	32,37	93,96	69,25	81,09
Rata -rata capaian					93,69	85,06	83,31

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik dilihat dari indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten.
- IPM dan komponennya adalah umur harapan hidup lama sekolah, rata-rata sekolah serta pengeluaran perkapita. Dengan dimensi utama pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup layak. Kendala yang dihadapi adalah perhitungan IPG dari pencapaian dimensi dan variabel yang sama dengan IPM yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Dari dasar ini diketahui data IPG diambil dari data BPS sebagai wali data.
- Indeks Pembangunan Keluarga berlandaskan pada konsep teori tentang keluarga, dimana keluarga terdiri dari struktur, peran dan fungsi serta berdasarkan pendekatan tahapan perkembangan keluarga yang hidup dalam lingkungan ekologi yang sehat.
- Ketika bicara tentang pembangunan manusia dan kebudayaan tentu tidak lepas dari keluarga. Ada dua hal yang harus diperhatikan di lingkungan keluarga yaitu kemiskinan dan kebodohan. Untuk membangun keluarga harus dimulai dengan pendidikan berkeluarga. Pemerintah pun tengah menggalang program prioritas bimbingan pranikah guna mempersiapkan keluarga Indonesia yang tangguh sehingga nantinya mampu melahirkan generasi yang berkualitas.
- Bisa dilihat bahwa capaian kinerja IPK yang dihasilkan masih dibawah target yang diharapkan. Masih ada kendala dalam perhitungan capaian kinerja dilihat dari rumusan hasil yaitu satu banding tiga unsur (Indeks Ketentraman+Indeks Kemandirian+Indeks kebahagiaan) dikali 100%. Serta kurangnya tenaga penyuluh ahli dalam mensosialisasikan tentang keluarga berkembang dan berkualitas.
- Dari beberapa gambaran diatas dapat ditarik kesimpulan untuk mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat dengan terus melakukan penyuluhan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga dan jaminan keuangan.

Kabupaten Kotawaringin Timur menerima penghargaan **Anugerah Parahita Ekapraya** merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi kementerian, lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender.



Penghargaan Layak Anak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas pembangunan gender dan keluarga, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mengawal pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting pada lingkup Pemerintah Daerah melalui Belanja Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024 ini, Pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja intervensi penanganan stunting untuk kemudian dirumuskan rekomendasi perbaikan berbagai kinerja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target prevalensi Stunting sebesar 14 persen di tahun 2024.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting ke depan, beberapa poin penting yang perlu ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait, diantaranya adalah: (1) Peningkatan koordinasi di lingkup internal Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk meningkatkan kesepahaman atas substansi dan informasi setiap Rincian Output yang mendukung penurunan stunting di masing-masing Perangkat Daerah sehingga proses pengklasifikasian penandaan tematik stunting per jenis intervensi dan keterkaitan antar Rincian Output terus dipertajam dan diperkuat; (2) Penguatan komitmen seluruh perangkat daerah terkait untuk memastikan bahwa Rincian Output yang terkait dengan intervensi gizi spesifik maupun sensitif, terutama yang menyangkut program 1000 HPK, tidak dilakukan refocussing/relokasi anggaran; (3) Memprioritaskan pelaksanaan Rincian Output yang menyangkut sasaran prioritas (ibu hamil, ibu menyusui, baduta) dan sasaran penting (balita, remaja, calon Pengantin, dll) dengan menyangkut desa/kelurahan yang angka prevalensi stunting-nya tinggi serta angka absolut stunting-nya besar; dan (4) Optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan di setiap lini lapangan secara integratif.



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,06	88,33	82,52	93,42	88,51	93,23
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	30,96	34,45	32,37	93,96	36,30	89,17

Tabel 3.32 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	86,79	88,53	88,91	75,48	82,52	88,51
2.	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	indeks	N/A	18,02	22,30	27,05	32,37	36,30

Sasaran " Meningkatkan kualitas pembangunan gender dan keluarga" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.33 Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	829.512.000,00	808.595.850,00	97,48
2	Program Perlindungan Perempuan	144.478.000,00	76.692.915,00	53,08
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.681.794.600,00	2.508.190.723,00	93,53
4	Program Pemberdayaan Dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.369.080.000,00	3.367.080.000,00	56,18

Faktor - faktor yang mempengaruhi belum tercapainya pencapaian sasaran

Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan keluarga " adalah :

- Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
- Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- Terbatasnya personil yang melayani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Masih tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG.



- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level.
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG).

Sasaran Ke-8 : Meningkatnya daya saing daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya daya saing daerah" dengan indikator kinerja Produktivitas Total Daerah dan Angka Kriminalitas Yang Tertangani mencapai **81,20%** dan termasuk predikat **"tinggi"**. Data capaian kinerja sasaran 8 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.34 Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Produktivitas Total Daerah	Juta	131,28	96,11	73,21	N/A	74,31
2.	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	permiriad (per sepuluh ribu)	4,81	4,29	89,19	114,81	128,46
Rata -rata capaian					81,20	114,81	101,38

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

1. Produktifitas Total Daerah

Indikator Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 131,28Juta dengan realisasi 96,11 Juta dengan capaian 73,21%

2. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Menurut POLRES Kabupaten Kotawaringin Timur, tindak pidana yang terjadi pada periode 2021 - 2024 mengalami kenaikan. Jumlah tindak pidana pada tahun 2024 sebanyak 614 kejadian dibandingkan kejadian tindak pidana tahun sebelumnya 387 kasus. Jumlah kasus tindak pidana yang telah diselesaikan ada sebanyak 311 kasus atau setara dengan 44%. Angka Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana relative meningkat. Sedangkan selang waktu terjadinya tindak pidana tahun 2024 adalah 12 Jam 25 menit 31 detik. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan resiko seseorang terkena tindak kejahatan di Kabupaten Kotawaringin Timur jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di
Kabupaten Kotawaringin Timur 2019 -2024

Kepolisian Resort	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Polres Kotim	211	241	209	194	194	194
Mentaya Hilir Selatan & Teluk Sampit	2	8	9	12	12	12
Pulau Hanaut	1	1	-	-	-	-
Mentawa Baru Ketapang & Seranau	20	21	32	27	27	27
Mentaya Hilir Utara	4	3	1	1	1	1
Kota Besi & Telawang	12	13	15	31	31	31
Baamang	21	25	20	23	23	23
Cempaga	1	3	4	11	11	11
Cempaga Hulu	5	14	13	20	20	20
Parenggean & Tualan Hulu	8	3	12	22	22	22
Mentaya Hulu & Bukit Santuai	10	11	15	26	26	26
Antang Kalang & Telaga Antang	9	8	5	20	20	20
Kotawaringin Timur	304	351	335	387	387	387

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

Angka Kriminalitas Yang Tertangani ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 4,81 permiriad dengan realisasi sebesar 4,29 permiriad dengan capaian sebesar 89,19%.

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya daya saing daerah	Produktivitas Total Daerah	125,55	131,28	96,11	73,21	135,24	179,32
		Angka Kriminalitas Yang Tertangani	5,45	4,81	4,29	89,19	3,69	5,39

Tabel 3.36 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Produktivitas Total Daerah	Juta	N/A	N/A	124,21	96,11	96,11	135,24
2.	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	permiriad (per sepuluh ribu)	N/A	N/A	5,89	5,89	4,29	3,69

Sasaran "Meningkatnya Daya Saing Daerah" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.37 Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	100.000.000,00	98.986.600,00	98,99
2.	Program Hubungan Industrial	154.287.050,00	149.371.950,00	96,81
3.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.700.640.260,00	1.463.383.034,00	86,05
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	810.786.300,00	786.238.100,00	96,97



Sasaran Ke-9 : Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga" dengan indikator kinerja Persentase wirausaha muda dan Jumlah prestasi olahraga mencapai **93,85%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 9 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.38 Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Persentase wirausaha muda	%	45,00	45,09	100,20	99,62	97,17
2.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	24,00	21	87,50	95,83	120,83
Rata -rata capaian					93,85	97,73	109

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

- Persentase wirausaha muda di Kabupaten Kotawaringin Timur terealisasi sebesar 45,09% dengan capaian 100,20% dari target yang ditetapkan sebesar 45,00%.
- Jumlah prestasi olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 sebesar 21 cabang olahraga dengan capaian 87,50% dari target 24 cabang olahraga. Indikator ini dihitung dari jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan dalam 1 tahun, yakni tahun 2024 berjumlah 29 cabang olahraga.

Pembangunan bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Ketersediaan fasilitas olahraga menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Menurut data Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur jumlah fasilitas olahraga Tahun 2024 sebanyak 295 unit. Jumlah ini terdiri dari bangunan fisik berupa lapangan, gedung serbaguna, kolam renang, sanggar senam sampai degan taman bermain. Terhitung sejak 2024, beberapa fasilitas olahraga yang berskala kecil seperti lapangan tenis meja tidak lagi masuk dalam kategori aset fasilitas olahraga dengan alasan mudah mengalami kerusakan dan tidak bertahan lama.

Tabel 3.39 Fasilitas Olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

No.	Fasilitas Olahraga	Jumlah
1.	Gedung Serba Guna	6
2.	Lapangan Voli	110
3.	Lapangan Basket	6
4.	Lapangan Sepak Bola	98
5.	Lapangan Bulu Tangkis	45



No.	Fasilitas Olahraga	Jumlah
6.	Taman Bermain	4
7.	Tenis Meja	1
8.	Sanggar Senam	5
9.	Lapangan Golf	2
10.	Kolam Renang	6
11.	Lapangan Futsal	8
12.	Lapangan Tenis	7
13.	Lapangan Takraw	4
14.	Lapangan Senam	5
Kotawaringin Timur		302

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga 2024

Tabel 3.40

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 9 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga	Persentase wirausaha muda	34,00	45,00	45,09	100,20	51,00	44,91
		Jumlah prestasi olahraga	24,00	24,00	21	87,50	24,00	27,43

Tabel 3.42 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Persentase wirausaha muda	%	N/A	N/A	33,12	36,86	45,09	51,00
2.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	N/A	N/A	20,00	23	21	24,00

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur

Sasaran "Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.43 Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	524.777.550,00	471.111.807,00	89,77
2.	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	5.196.127.800,00	4.030.683.506,00	77,57



Sasaran Ke-10 : Meningkatnya keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan" dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan mencapai **90,22%** dan termasuk predikat **"tinggi"**. Data capaian kinerja sasaran 10 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.44 Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Indeks Ketahanan Pangan	%	80,95	73,03	90,22	98,64	97,65
Rata -rata capaian					90,22	98,64	97,65

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 10 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78,58	80,95	73,03	90,22	82,58	88,44

Tabel 3.46 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Indeks Ketahanan Pangan	%	N/A	77,56	78,28	78,28*	73,03	82,58

Sasaran "Meningkatnya keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :



Tabel 3.47 Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	770.714.200,00	675.058.600,00	87,59
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	20.530.400,00	15.268.200,00	74,37
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	44.875.400,00	33.080.000,00	73,72

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ” Meningkatkan keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan” adalah :

1. Adanya sumber daya manusia yang cukup baik kualitas maupun jumlah sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik
2. Adanya Regulasi Bidang Pangan sebagai dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan strategis yaitu Tersedianya PERDA Cadangan Beras Pemerintah Daerah No 9 Tahun 2021 Yang mengatur tentang perencanaan, pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah daerah sebagai bagian dari cadangan pangan nasional.
3. Adanya Sinergitas dan Dukungan Pusat melalui program dan kegiatan serta pendanaan untuk mendukung Pembangunan Ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Letak geografis yang strategis sebagai jalur masuk utama perdagangan termasuk perdagangan pangan di Kalimantan Tengah baik melalui laut, udara maupun darat.
5. Peluang pasar untuk sektor pangan karena Kota Sampit adalah kota perdagangan dan jasa serta pariwisata
6. Mulai berkembangnya ekonomi pasca covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur yang cukup cepat, sehingga mendorong pihak perbankan untuk memberikan fasilitas pendanaan/kredit bagi UMKM bidang pangan untuk lebih berkembang membangun unit usahanya.
7. Tersedianya Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur sampai tingkat desa sehingga memudahkan melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengentasan daerah rawan pangan.

Sasaran Ke-11 : Meningkatkan kesejahteraan petani

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ” Meningkatkan kesejahteraan petani” dengan indikator kinerja Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB mencapai **94,05%** dan termasuk predikat ”**sangat tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran 11 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.48 Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	22,84	21,48	94,05	97,19	95,59
Rata -rata capaian					94,05	97,19	95,59

Keterangan : ** angka sangat sementara 2020

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan indikator ini kita akan memperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat memakmuran masyarakat suatu wilayah.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, baik di tingkat wilayah propinsi maupun kabupaten atau kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga perubahan PDRB yang terjadi ditingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya.

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai 94,05% dari target 22,84% terealisasi 21,48% yang dimana angka realisasi masih sangat sementara yaitu angka tahun 2021 dikarenakan nilai tahun 2024 belum terbit dari BPS Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 11 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	21,73	22,84	21,48	94,05	23,58	91,09

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.50 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	21,48	21,48**	21,48**	21,48**	21,48**	23,58



Sasaran " Meningkatkan kesejahteraan petani" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.51 Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.248.725.700,00	8.555.114.162,00	92,50
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.534.791.300,00	3.852.033.955,00	58,95
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	160.787.700,00	141.428.350,00	87,96
4.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	69.345.200,00	67.262.300,00	87,96
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	80.000.800,00	54.258.850,00	67,82
6.	Program Penyuluhan Pertanian	1.559.707.500,00	1.278.679.410,00	81,98

Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran " Meningkatkan kesejahteraan petani " adalah:

- 1) Koordinasi yang sistematis dan kontinyu baik di level pembuat kebijakan, unit kerja, petani dan *stake holder* lain.
- 2) Adanya inovasi teknologi pertanian, pangan dan perikanan yang diterapkan oleh petani
- 3) Fasilitasi bantuan sarana prasarana pertanian dan perikanan yang disalurkan kepada petani, terutama yang merupakan fasilitasi dari pemerintah pusat yang tidak masuk dalam rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid.
- 4) Kualitas sumber daya manusia yang berdedikasi tinggi dalam melaksanakan pendampingan dan pelayanan ke kelompok tani dan masyarakat.
- 5) Kesadaran petani yang semakin tinggi untuk memproduksi hasil pertanian yang bermutu.
- 6) Tingginya harga pakan ternak, pakan ikan dan obat-obatan ternak berdampak pada tingginya biaya produksi sektor peternakan dan perikanan
- 7) Masih rendahnya harga komoditas pertanian pada saat panen raya.

Sasaran Ke-12 : Meningkatnya aktivitas ekonomi rakyat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat" dengan indikator kinerja Persentase Usaha Mikro dan Kecil mencapai **74,73%** dan termasuk predikat "**sedang**". Data capaian kinerja sasaran 12 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.52 Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	91,00	68	74,73	110	102,20
Rata -rata capaian					74,73	110	102,20

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Kinerja bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah didasarkan pada indikator jumlah koperasi dan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 3.53

Tabel 3.53 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2023-2024

No	ASPEK	2023	2024
1	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
1.	Jumlah Induk Koperasi / Koperasi Sekunder	-	-
2.	Jumlah Koperasi Primer	352	370
3.	Koperasi Aktif	282	300
4.	Koperasi Tidak Aktif	70	70
5.	Koperasi KUD	20	20
6.	Koperasi Non KUD	332	350
2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
	Mikro	28.774	39.905
	Kecil	3.033	3.033
	Menengah	31	31

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kotim

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 12 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya aktivitas ekonomi rakyat	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	90,00	91,00	68,00	74,73	92,00	73,91

Tabel 3.55 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2026
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	N/A	99,00	99,00	93,00	68,00	92,00



Sasaran "Meningkatnya aktivitas ekonomi rakyat" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.56 Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	205.179.600,00	128.725.700,00	62,74
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	117.068.000,00	114.147.145,00	97,50
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	88.117.000,00	72.121.220,00	81,85
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	412.552.700,00	339.034.900,00	82,18
5.	Program Pengembangan UMKM	1.253.044.500,00	1.045.535.702,00	83,44

Sasaran Ke-13 : Menguatnya sektor pariwisata

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Menguatnya sektor pariwisata" dengan indikator kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB mencapai **139,43%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 13 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.57 Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,75	2,44*	139,43	169,44	153,46
Rata -rata capaian					139,43	169,44	153,46

Keterangan : * angka tahun sebelumnya

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki sektor pariwisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pada Tahun 2024 sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Timur, mengalami kenaikan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Jumlah kunjungan mancanegara ke Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat hanya 123 wisatawan. Sedangkan wisatawan domestik tercatat sebanyak 238.557 wisatawan pada Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, wisatawan mancanegara dan domestik tahun 2024 yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan ini dikarenakan sudah ada pelonggaran kegiatan pada saat pandemi Covid-19 setelah sebelumnya dilaksanakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di seluruh Indonesia



sebagai tindakan untuk mencegah penyebaran Virus Corona (Covid19) yang sedang marak terjadi di seluruh penjuru dunia.

Kenaikan pada sektor pariwisata juga terlihat dari bertambahnya jumlah restoran atau rumah makan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Masih menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah restoran atau rumah makan pada tahun 2024 sebanyak 270 restoran atau rumah makan yang tersebar hampir diseluruh kecamatan. Jumlah ini naik hingga 53 persen dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 176 restoran atau rumah makan. Pada fasilitas akomodasi lain seperti hotel, pada Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat setidaknya terdapat 85 hotel.

Potensi sektor Pariwisata juga dapat terlihat dari adanya peninggalan sejarah dan kepurbakaaan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, barang disebut bersejarah jika memiliki kisahnya dan telah ada minimal 50 tahun. Pada Tahun 2024 dinas terkait melakukan update kembali jumlah barang kepurbakalaan guna menginvetaris data terbaru berkaitan dengan peninggalan bersejaraan. Tercatat pada tahun 2024 ada 20 tugu/monumen, 37 rumah betang, 310 kompleks sandung dan 475 kompleks sapundu ditambah 14 unit makam. Dari sektor wisata alam, Pantai Ujung Pandaran menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Beberapa kegiatan berskala regional telah diadakan di Ujung Pandaran yang diharapkan dapat mempromosikan tempat tersebut.

Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 13 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Menguatnya sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	1,31	1,75	2,44*	139,43	2,11	115,64

Tabel 3.59 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	N/A	2,44	2,44	2,44	2,44	2,11



Sasaran "Menguatnya sektor pariwisata" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.60 Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	153.266.000,00	140.886.950,00	91,92
2.	Program Pemasaran Parawisata	221.454.000,00	197.000.796,00	88,96
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	61.349.800,00	60.471.100,00	98,57

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran "Menguatnya sektor pariwisata" adalah :

1. Terdapat objek dan daya tarik wisata yang potensial untuk dikembangkan.
2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan yang cukup komprehensif.
3. Tersedianya infrastruktur yang menunjang sektor pariwisata.
4. Semakin meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung ke objek wisata.
5. Atraksi wisata secara rutin dilaksanakan.

Sasaran Ke-14 : Meningkatnya investasi di daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya investasi di daerah" dengan indikator kinerja Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) mencapai **136,42%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 14 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.61 Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	1.654.710.332.625,00	2.257.323.060.000,00	136,42	108,01	91,69
Rata -rata capaian					136,42	108,01	91,69

Sumber : DMPTSP Kab. Kotim 2024

Pencapaian indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) terealisasi sebesar Rp 2.257.323.060.000,00 dari target sebesar Rp 1.654.710.332.625,00 dengan capaian sebesar 136,42%

Sasaran kinerja Strategis ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi "Mewujudkan Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Dan Penyediaan Lapangan Kerja" Pelaksanaan sasaran kinerja oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur ini, didukung dengan biaya sebesar Rp. 383.598.000,00



Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 14 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya investasi di daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	29.878,77	1.654.710.332.625,00	2.257.323.060.000,00	136,42	34.284,98	6.583,99

Tabel 3.63 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	N/A	29.728,73	33.240,71	5.066.515	2.257.323	34.284,98

Sasaran " Meningkatkan investasi di daerah" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.64 Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	383.598.000,00	358.878.750,00	93,56

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran " Meningkatkan investasi di daerah" adalah :

- bagi pengembangan berbagai investasi dan usaha di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, baik dari aspek birokrasi dan perizinan ;
- Kondisi sarana dan prasarana (transportasi, komunikasi, utilitas, pengelolaan limbah dll) yang cukup mendukung bagi pengembangan investasi dan berbagai usaha ;
- Tersedianya tenaga kerja yang cukup memadai di berbagai jenis investasi dan berbagai usaha ;
- Kearifan lokal (adat istiadat / budaya) yang mendukung perkembangan iklim investasi dan berbagai usaha ;
- Terbitnya Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Kabupaten Kotawaringin Timur, merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ekosistem



investasi dan kegiatan berusaha yang lebih efektif, sederhana, transpaan, terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan.

- Adanya Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur, merupakan acuan atau pedoman yang sangat membantu Perangkat Daerah / DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur / Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang terkait dengan penanaman modal.
- Adanya sistem survei berbasis aplikasi, memudahkan para responden mengisi kuesioner melalui PC (Personal Cumputer) yang disediakan pada saat mengajukan / mengurus perizinan di kantor DPMPTSP Kab. Kotawaringin Timur ;
- Tidak dibatasinya jumlah responden yang harus mengisi kuesioner yang disediakan, memudahkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ;
- Potensi investor / pengusaha yang mamadai di Kabupaten Kotawaringin Timur, memudahkan pemenuhan jumlah responden yang diinginkan. Survei dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan mencapai target yang telah ditetapkan ;
- Sikap kooperatif dari responden, sangat membantu pelaksanaan survei dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan ;
- Adanya pendampingan bagi responden yang tidak memahami aplikasi survei, dirasa sangat membantu responden dalam mengisi kuesioner.

Kendala yang dihadapi :

- Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di Daerah

Faktor - faktor penghambat pencapaian sasaran kinerja dan indikator kinerja ini antara lain :

1. Pengembangan daya saing Kabupaten Kotawaringin Timur belum optimal, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk menumbuhkan daya tarik dan iklim yang produktif kegiatan investasi / ekonomi / usaha ;
2. Promosi investasi dan berbagai usaha dengan berbagai media belum optimal dilakukan, terutama pemanfaatan melalui media sosial. Masih cukup banyak sarana promosi yang bisa dimanfaatkan, seperti pemanfaatan ruang / area di Terminal Bis, Pelabuhan Laut / Sungai dan Bandar Udara ;
3. Kebijakan persebaran penanaman modal yang lebih merata, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, perlu evaluasi kembali **progres persebarannya (Wilayah Selatan : Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, Pulau**



Hanut dan Mentaya Hilir Utara diarahkan menjadi wilayah pusat pengembangan sektor **Pariwisata, Pertanian, Tanaman Pangan dan Perikanan. Wilayah Tengah** : Mentawa Baru Ketapang, Baamang, Seranau, Kota Besi, Telawang dan Cempaga, diarahkan menjadi pusat pengembangan sektor **Perdagangan, Pariwisata, Industri, Transportasi, Perikanan Darat, Hortikultura dan Peternakan. Wilayah Utara** : Mentaya Hulu, Parenggean, Cempaga Hulu, Antang Kalang, Tualan Hulu, Telaga Antang dan Bukit Santuai, diarahkan menjadi pusat pengembangan sektor **Perkebunan, Peternakan dan Pariwisata**).

- **Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan**

Berbagai kendala atau faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini antara lain :

1. Kurangnya pemahaman responden terhadap aturan / ketentuan terkait pertanyaan / kuesioner yang diajukan, menimbulkan kesulitan tersendiri bagi responden dalam mengisi kuesioner. Pendidikan dan latar belakang pengalaman investor / pelaku usaha bervariasi ;
2. Kurangnya pemahaman responden terhadap penggunaan aplikasi survei, menimbulkan kesulitan tersendiri bagi responden dalam mengisi kuesioner. Akibatnya, responden perlu pendampingan / asistensi dari staf DPMPTSP Kab. Kotawaringin Timur ;
3. Keterbatasan fasilitas survei (*Personal Computer*) dan jaringan internet yang cepat dan stabil, berdampak pada lambatnya proses pengisian kuesioner survei. Personal komputer (PC) yang ada saat ini rata - rata berumur tua dan perlu *update*;
4. Kondisi ruang pelayanan (*front office*) belum sepenuhnya representatif. Akibatnya cukup mengganggu kenyamanan dalam pengisian kuesioner dan menerima pelayanan publik.
5. Kurangnya anggaran untuk pembiayaan perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik.

- **Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi di Daerah**

Solusi atas berbagai permasalahan terkait pencapaian sasaran dan indikator kinerja di atas sebagai berikut :

1. Perlu **normalisasi anggaran** yang signifikan, agar capaian sasaran kinerja dan indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan ;



2. Perlu dilakukan **evaluasi** terhadap **Daya Saing Daerah**, terutama yang terkait dengan meningkatkan daya tarik dan iklim yang produktif bagi pengembangan investasi / ekonomi / dunia usaha ;
3. Perlu upaya yang **komprehensif** dan **simultan**, dengan melibatkan semua *Stakeholder* (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) dalam mendongkrak / memulihkan PDRB;
4. Perlu **peningkatan promosi investasi** di Kabupaten Kotawaringin Timur melalui berbagai media sosial. Menggandeng berbagai Maskapai Penerbangan, Pengusaha Transpotasi Darat, Laut dan Sungai. Menggandeng Pemilik Otoritas Terminal Darat, Laut, Sungai dan Udara dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan berbagai usaha secara terstruktur dan massif ;
5. Perlu dilakukan **evaluasi** terhadap progres arah kebijakan **persebaran penanaman modal** yang lebih merata, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah (**Wilayah Selatan, Wilayah Tengah dan Wilayah Utara**).

- **Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan**

Solusi atas berbagai permasalahan atau berbagai kendala terkait pencapaian sasaran kinerja dan indikator kinerja di atas sebagai berikut :

1. Perlu **normalisasi anggaran** yang signifikan, agar capaian sasaran kinerja dan indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan ;
2. Perlunya ada semacam **sosialisasi / diseminasi** kepada para *Stake Holder* (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) tentang berbagai aturan perizinan, produk perizinan dan aplikasi perzinan ;
3. Perlunya **pengembangan sarana** dan **prasarana** pelayanan perizinan / pelayanan publik (Gedung Kantor, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, PDAM dan Jaringan Internet) ;

Perlunya **penambahan anggaran biaya** yang cukup, khususnya terkait *Up Date* sarana dan prasarana pelayanan publik / pelayanan perizinan.



Sasaran Ke-15 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan publik" dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai **100%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 15 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.65 Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	Baik	Baik	100	100	100
Rata -rata capaian					100	100	100

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan pada 5 (lima) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik, yaitu RSUD Dr. Murjani, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan BKPSDM

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap kelima Perangkat Daerah tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. RSUD Dr. Murjani dengan nilai 81,47
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 88,84
3. Badan Pendapatan Daerah dengan nilai 83,52
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 86,47
5. BKPSDM dengan nilai 86,60

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kepuasan masyarakat terhadap layanan pada kelima unit layanan tersebut "Baik".

Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0085/Huk-ORG/2023 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur.



Berdasarkan pengelolaan SP4N-LAPOR! selama tahun 2024 , didapatkan total laporan yang masuk dan telah terdisposisi sebanyak 43 laporan. Dari 43 laporan tersebut, 38 laporan dalam status selesai, 5 laporan arsip

Data Pengelolaan Laporan Masuk

Laporan Belum Terverifikasi	0
Terdisposisi Belum Ditindaklanjuti	0
Terdisposisi Sedang Diproses	0
Terdisposisi Selesai	38
Laporan Tertunda	0
Laporan Arsip	5
Total	43

Tabel 3.66 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 14 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100,00

Tabel 3.67 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sasaran " Meningkatkan kualitas pelayanan publik" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.68 Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	175.955.693.402,00	148.602.718.316,00	84,45
2.	Program Pendaftaran Penduduk	49.990.000,00	47.461.165,00	94,94
3.	Program Pencatatan Sipil	49.990.000,00	49.714.595,00	99,45
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.664.890.000,00	2.943.521.278,00	80,32



Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ” Meningkatkan kualitas pelayanan publik” adalah :

1. Perangkat Daerah pelaksana pelayanan publik telah melakukan peningkatan pelayanan dan ketersediaan fasilitas yang lebih baik, misalnya Badan Pendapatan Daerah membuka Unit Pelayanan Kas Bank Kalteng di Kantor Bapenda.
2. Tersedianya standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur pada semua unit layanan.
3. Inovasi layanan yang terus ditingkatkan seperti tersedianya aplikasi pelayanan pajak daerah e-PBB dan e-BPHTB yang langsung dapat diakses melalui website Bapenda.
4. Tersedianya layanan pengaduan pelayanan publik, baik yang dikelola melalui SP4N-LAPOR! Maupun melalui layanan pengaduan pada masing-masing unit layanan.

Berdasarkan hasil penilaian dari Ombudsman RI tentang Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 mendapat nilai 80,27 dengan Kategori B dengan Opini Kualitas Tinggi atau masuk zona hijau. Penilaian oleh Ombudsman dilakukan pada 2 (dua) Puskesmas dan 4 (empat) Perangkat Daerah.

Hasil penilaian dari Ombudsman adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.69 Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024**

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Puskesmas Pasir Putih	12.85	30.88	23.9	16.14	83.78
2	Puskesmas Baamang I	9.76	30.14	23.83	16.59	80.33
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.11	29.02	24.24	16.95	83.32
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.29	28.82	22.81	19.04	84.96
5	Dinas Pendidikan	8.15	27.99	24.24	16.03	76.42
6	Dinas Sosial	8.67	28.51	21.38	14.29	72.85
Nilai Akhir dan Zona					80.27	
Kategori					B	
Opini					Kualitas Tinggi	

Sumber : Ombudsman RI 2024

Sasaran Ke-16 : Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan 4 (empat) indikator kinerja mencapai **99,10%** dan termasuk predikat **"sangat tinggi"**. Data capaian kinerja sasaran 16 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.70 Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Opini BPK	kriteria	WTP	WTP	100	WTP	WTP
2.	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	%	92	85	92,39	71,5	71
3.	Nilai SAKIP	kriteria	B	B	100	B	B
4.	Nilai LPPD	kriteria	Tinggi	Tinggi	100	Tinggi	Tinggi
Rata - Rata Capaian					99,10	106,68	104,00

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

1. Opini BPK

Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 34.A/LHP/XIX.PAL/05/2021 tanggal 28 Mei 2021, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan menyatakan bahwa hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Pemkab. Kotim telah meraih Opini sebanyak 5 kali sejak tahun 2016. Dengan demikian capaian Indikator Kinerja Opini BPK tercapai 100%



Thropy Penghargaan
atas Capaian Opini
WTP 5 (lima) Kali
Berturut-turut untuk
Pemerintah
Kabupaten
Kotawaringin Timur
dari Kementerian
Keuangan RI

2. Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh Pemerintah Daerah. MCP meliputi 8 area intervensi yaitu manajemen APIP, optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran



APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Progres capaian Pemkab Kotim pada masing-masing area adalah sebagai berikut :

- Perencanaan dan Penganggaran 80%
- Pengadaan barang dan jasa 95%
- Perizinan / PTSP 100%
- Pengawasan APIP 92%
- Manajemen ASN 97%
- Optimalisasi pajak daerah 86%
- Manajemen Aset Daerah 65%
- Tata Kelola Keuangan Desa 100%

Capaian MCP KPK Pemkab Kotim Tahun 2022 89,38% atau 126,73% dari target.

3. Nilai SAKIP

Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan nilai 67,28 dengan predikat baik (B). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah baik

4. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Nilai LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 adalah "Tinggi" atau tercapai 100% sesuai target.

5. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Evaluasi Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2023 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan **nilai 72,01 dengan kategori "BB"**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat kemajuan atas implementasi pelaksanaan reformasi Birokrasi, terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif serta terciptanya budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang profesional.



6. Nilai Implementasi Indeks BerAKHLAK

Evaluasi implementasi Indeks BerAKHLAK pada pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan hasil Survei Pemetaan Dan Pengukuran Budaya Kerja ASN adalah 61,3% (Cukup Sehat) dengan kategori B.

Tabel 3.71 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 16 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100,00
		Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention</i> (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	68,84	92	85	92,39	75,18	94,44
		Nilai SAKIP	B	B	B	100	BB	100,00
		Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100	Sangat Tinggi	100,00

Tabel 3.72 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Opini BPK	kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention</i> (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	%	-	68	81	83	85	75,18
3.	Nilai SAKIP	kriteria	B	B	B	B	B	BB
4.	Nilai LPPD	kriteria	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi

Sasaran " Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.73 Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pergawasan	3.536.910.000,00	1.792.366.591,00	50,68
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	447.695.090,00	250.481.550,00	55,95
3.	Program Penataan Organisasi	242.621.600,00	172.867.058,00	71,25
4.	Program Administrasi Tata Pemerintahan	481.684.200,00	359.753.629,00	74,69



Faktor – faktor kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran "Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel" adalah :

1. Pengintegrasian sistem perencanaan, keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD telah menciptakan keterpaduan dan keselarasan data kinerja.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkesinambungan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan secara lebih efektif dan efisien.
3. Supervisi dari Pemerintah melalui MCP KPK yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Sasaran Ke-17 : Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)" dengan indikator kinerja indeks SPBE mencapai **115,00%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 17 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.74 Realisasi Indikator Sasaran 17 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Indeks SPBE	kriteria	2,80	3,22	115,00	108,18	124,40
Rata -rata capaian					115,00	108,18	124,40

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Indeks SPBE Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh Predikat "**Baik**" dengan nilai **3,22**. Hal ini merupakan peningkatan bagi Kabupaten Kotawaringin Timur yang tahun sebelumnya mendapat nilai **3,11** atau predikat "**Baik**".

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi semua oleh Pemkab Kotawaringin Timur adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



Tabel 3.75 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 17 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,00	2,80	3,22	115,00	3,20	100,63

Tabel 3.76 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2026
1.	Indeks SPBE	kriteria	Belum ada penilaian PMPRB	1,66	2,38	3,11	3,22	3,20

Sasaran " Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.77 Program dan Anggaran Sasaran 17 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.671.883.400,00	3.496.416.136,00	95,22

Faktor – faktor kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran " Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)" adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum memiliki kebijakan internal terkait Tata Kelola SPBE, tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan terkait Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah Daerah yang disampaikan belum memenuhi kriteria muatan Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE serta belum memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal.
2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum memiliki Perencanaan Strategis SPBE, tidak ditemukan adanya bukti dukung atau dokumentasi terkait Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi



Pemerintah Daerah, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE serta Inovasi Proses Bisnis SPBE yang disampaikan belum tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan pada Perencanaan Strategis SPBE, hanya mencakup sebagian dari referensi domain arsitektur SPBE, belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah secara lengkap serta kondisi Dokumen Proses Bisnis belum memenuhi standar.

3. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum memiliki atau belum sepenuhnya menyediakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah. serta Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah atau proses pembangunannya masih belum dilakukan secara terencana, dikonsultasikan dengan unit kerja terkait serta terpadu antar unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur masih belum memiliki atau membentuk Tim Koordinasi SPBE yang sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan SPBE dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya atau program kerja Tim Koordinasi SPBE
5. Pemerintah Daerah belum mengkoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE melalui melalui strategi pengelolaan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur.



Sasaran Ke-18 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kemandirian keuangan daerah" dengan indikator kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mencapai **72,28%** dan termasuk predikat "**sedang**". Data capaian kinerja sasaran 18 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.78 Realisasi Indikator Sasaran 18 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	18,00	13,01	72,28	87,65	101,43
Rata -rata capaian					72,28	87,65	101,43

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah merupakan sasaran strategis daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selaku koordinator pendapatan daerah bersama 16 (enam belas) SOPD Pemungut lainnya. Adapun Rekapitulasi Data Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	TARGET (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
PENDAPATAN ASLI DAERAH	585.143.313.400,00	309.206.255.795,43	52,84
PENDAPATAN TRANSFER	1.477.152.532.000,00	1.692.853.155.300,00	114,60
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	8.129.604.527,63	-
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2.432.356.040.400,00	2.341.689.340.613,06	96,27

Dimana untuk menghitung capaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah" dengan indikator "Rasio Kemandirian Keuangan Daerah" didapat dengan rumus formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebesar 18,00% dari target sebesar 13,01% atau persentase capaian realisasi sebesar 72,28%.

- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2024 berada diangka 17,75%. Realisasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 17,50% dengan persentase capaian realisasi sebesar 101,43%. Hal ini menggambarkan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh SOPD Pemungut Kab. Kotim



selama Tahun 2024 sudah sangat baik. Hal ini didukung dengan adanya Optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan seluruh *stakeholder* dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 18 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,50	18,00	13,01	72,28	19,00	68,47

Tabel 3.80 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	16,21	19,26	15,90	17,75	13,01	19,00

Sasaran " Meningkatkan kemandirian keuangan daerah" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.81 Program dan Anggaran Sasaran 18 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.664.890.000,00	2.943.521.278,00	80,32

Faktor – faktor kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran " Meningkatkan kemandirian keuangan daerah" adalah :

1. Strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah, yang diarahkan pada profesionalisme sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah yang secara bertahap diikuti dengan dukungan sistem dan prosedur serta penggunaan teknologi informasi. Peningkatan promosi objek pendapatan daerah dan daya saing investasi dengan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana objek pendapatan daerah juga membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang investasi.
2. Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:
 - a. Penggalan dan perluasan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;



- b. Mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
 - c. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
 - g. Mewujudkan terbentuknya BUMD yang handal.
3. Untuk pencapaian target pendapatan dilakukan antara lain dengan, pengkajian potensi pendapatan daerah, pelayanan pendaftaran, online pajak daerah, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, peningkatan pelayanan di Bappenda. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.
4. Peningkatan kemampuan keuangan daerah juga diarahkan pada peran investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.
5. Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:
 - a. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - c. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.
6. Meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:
- Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
 - Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah, salah satunya dengan pelayanan pajak secara daring (online);
 - Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
 - Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
 - Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
 - Peningkatan peran dan fungsi SOPD Pemungut sebagai ujung tombak pelayanan publik;
 - Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Mitra Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi





Sasaran Ke-19 : Meningkatnya kemandirian desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kemandirian desa" dengan indikator kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mencapai **900,00%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 19 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.82 Realisasi Indikator Sasaran 19 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	8	72	900	1000	100
Rata -rata capaian					900	1000	100

Berdasarkan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional 2022-2024. Indikator kinerja DPMD yang termasuk dalam standar nasional adalah indikator kinerja tujuan yaitu "Jumlah desa Mandiri". Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 400 tahun 2024 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2024, jumlah desa di Indonesia sebanyak 75.261 desa dengan jumlah desa mandiri sebanyak 17.023 desa. Angka tersebut sudah jauh melampaui target RPJMN 2024 yaitu 5.000 desa berstatus mandiri. Sedangkan Jumlah desa di Kalteng sebanyak 1.432 desa, tercatat sebanyak 248 desa dengan status desa mandiri. Dari hasil rekapitulasi data Indeks Desa Membangun yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia diketahui bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2024 menduduki peringkat 157 dari 434 kabupaten/kota se Indonesia dengan jumlah desa mandiri sebanyak 72 desa dengan target 8 desa .

Tabel 3.83 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 19 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Desa Mandiri	4	8	72	900	9,00	800

Tabel 3.84 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	2	6	7	70	72	7



Sasaran " Meningkatkan kemandirian desa" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.85 Program dan Anggaran Sasaran 19 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.005.055.400,00	680.242.568,00	67,68
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	1.396.567.400,00	1.083.207.877,00	77,56

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran " Meningkatkan kemandirian desa" adalah :

- Terdapat beberapa desa yang telah mempunyai bonus demografi sebagai Ibu Kota Kecamatan atau daerah pusat ekonomi sehingga dapat dengan cepat meningkatkan perkembangan status desa berdasarkan IDM, yaitu Desa Pundu dan Desa Sebaby sebagai ibu kota kecamatan,
- Terdapat perkembangan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur yang cukup cepat, sehingga mendorong pihak perbankan untuk membuka unit-unit kerja pada Kecamatan atau Desa, serta usaha-usaha perdagangan di wilayah-wilayah yang dekat dengan perkebunan besar kepala sawit, yaitu Desa Eka Bahurui, Bandar Agung, Pelantaran dan Desa Cempaka Mulia Barat.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran " Meningkatkan kemandirian desa" adalah :

- Masih belum adanya sinergitas OPD di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya meningkatkan status perkembangan desa.
- Kemampuan SDM perangkat desa yang masih kurang.
- Kemampuan lembaga ekonomi desa yang belum berkembang sehingga dapat mendorong kemajuan ekonomi desa.
- Masih terdapat beberapa Desa yang tidak memiliki tenaga kesehatan dan jauh dari prasarana kesehatan.
- Masih terdapat beberapa desa yang sulit dijangkau dengan jalan darat karena kondisi jalan yang rusak.

Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran " Meningkatkan kemandirian desa" adalah :

- Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam upaya meningkatkan status perkembangan desa
- Melakukan upaya peningkatan SDM perangkat desa melalui kegiatan pelatihan/ sosialisasi



- Mendorong berkembangnya BUMDes yang telah terbentuk agar mendukung kemajuan desa
- Memaksimalkan peran pendamping desa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa agar dapat mendorong kemajuan/pembangunan di desa

Sasaran Ke-20 : Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan" dengan 4 (empat) indikator kinerja mencapai **102,84%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 20 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.86 Realisasi Indikator Sasaran 20 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Indeks Kualitas Air	indeks	69,4	46,00	66,28	105,33	88,52
2.	Indeks Kualitas Udara	indeks	89,21	94,67	106,12	101,08	102,29
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	54,55	51,21	93,88	95,01	97,10
4.	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	65,00	94,30	145,08	151,11	143,42
Rata -rata capaian					102,84	113,13	107,83

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 46 (Kategori Sedang) yang diperoleh dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dengan capaian 66,28%
2. Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 94,67 dengan capaian 106,12%. Perhitungan diperoleh dari Data Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 51,21 dengan capaian 93,88. Perhitungan diperoleh dari Data Citra Satelit dari KLHK dan Tabulasi Data Numerik yang diinput dalam Sistem Aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
4. Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 94,30% dengan capaian 145,08%



Tabel 3.87 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 20 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	4,81	69,4	46,00	66,28	4,82	954,36
		Indeks Kualitas Udara	66,71	89,21	94,67	106,12	66,72	141,89
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	53,76	54,55	51,21	93,88	53,77	95,24
		Timbulan Sampah yang Ditangani	50,00	65,00	94,30	145,08	70,00	134,71

Tabel 3.88 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Indeks Kualitas Air	indeks	N/A	59,23	62,67	52,67	46,00	59,73
2.	Indeks Kualitas Udara	indeks	N/A	90,63	89,97	91,05	94,67	89,30
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	N/A	50,59	51,08	52,2	51,21	54,65
4.	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	N/A	39,94	83,11	86,05	94,30	70,00

Sasaran "Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.89 Program dan Anggaran Sasaran 20 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.513.625.000,00	1.102.169.854,00	72,82
3	Program Pengelolaan Persampahan	4.873.070.700,00	4.333.978.621,00	88,94

Sasaran Ke-21 : Meningkatnya kualitas ruang publik

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas ruang publik" dengan indikator kinerja Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB mencapai **119,30%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 21 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.90 Realisasi Indikator Sasaran 21 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	7,1	8,47	119,30	85,37	82,90
Rata -rata capaian					119,30	85,37	82,90

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Ketersediaan mewujudkan penataan ruang untuk mendukung Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}}$$

Rasio Ruang Hijau per Satuan Wilayah ber HPL/HGB teralisasi 8,47 dengan capaian 119,30% dari target yang ditetapkan.



**Pembangunan RTH Jl. Pramuka
(Kantor Pemda)**



Pembangunan RTH Jl. Tidar

Pembangunan RTH Jl. C. Mihing / SMP 3

Tabel 3.91 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 21 Tahun 2024 dengan Target RPJMD
AKUNTABILITAS KINERJA



NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya kualitas ruang publik	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	6,5	7,1	8,47	119,30	7,5	113

Tabel 3.92 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 21 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2026
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	N/A	6,74	5,72	5,72	8,47	7,5

Sasaran " Meningkatkan kualitas ruang publik" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.93 Program dan Anggaran Sasaran 21 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	700.000.000,00	395.439.635,00	56,49

Sasaran Ke-22 : Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman" dengan indikator kinerja Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Persentase penurunan jumlah titik api (*hotspot*) mencapai **100,00%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja sasaran 22 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.94 Realisasi Indikator Sasaran 22 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	340,02	167,81
2.	Persentase penurunan jumlah titik api (hot spot)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata capaian					100,00	220,01	133,90

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran untuk Tahun 2024 sebesar 100,00% menunjukkan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 100,00%, dengan capaian kinerja sebesar 100,00%. Tercapainya target cakupan pelayanan bencana kebakaran karena terlaksananya kegiatan Pos Komando Siaga Darurat Bencana berkedudukan di Kantor Pusdaplops BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi siaga darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan siaga darurat bencana. Pos Komando siaga Darurat Bencana di Kabupaten Kotawaringin. Pos Komando Siaga Darurat Berencana ini didukung oleh unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, TNI, POLRI, DAMKAR, Manggala Agni, Instansi terkait, SAR, Kecamatan, KPHP dan masyarakat yang tergabung dalam MPA (Masyarakat Peduli Api). Pos Komando, Adalah Pos Utama Yang Menjadi Pusat Kendali Operasi, Perencanaan Kegiatan, Pengumpulan Data, Koordinasi Lintas Lini, Penyusunan Laporan Dan Penyampaian Informasi Terpusat Dari Seluruh Kegiatan Penanganan Karhutla Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur juga di bentuk 7 (tujuh) Pos Lapangan adalah Pos dibawah kendali Pos Induk Komando dengan fungsi penanganan lapangan yang difokuskan pada kecamatan paling rawan karhutla. dilengkapi dengan peralatan dan personil yang memadai untuk dapat melakukan tindakan mulai pencegahan, penanganan sampai penegakan hukum lokasi **9 (sembilan) pos lapangan** ini antara lain :

- 1) Pos Komando Lapangan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
- 2) Pos Komando Lapangan Kecamatan Kota Besi-Kecamatan Cempaga Hulu
- 3) Pos Komando Lapangan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
- 4) Pos Komando Lapangan Kecamatan Parenggean
- 5) Pos Komando Lapangan Baamang
- 6) Pos Komando Lapangann Kecamatan Mentaya Hilir Utara
- 7) Pos Komando Lapangan Kecamatan TelukSampit



8) Pos Komando Lapangan Kecamatan Cempaga

9) Pos Komando Lapangan Kecamatan Mentaya Hulu

Tugas pokok harian dari Pos komando lapangan ini adalah :

1. Monitoring kawasan (sumber air, kedalaman gambut, tinggi muka air, penumpukan bahan bakaran, cuaca, aktivitas masyarakat yang berisiko terjadinya karhutla)
2. Sosialisasi (anjangsana, penyuluhan dll)
3. Pencarian informasi dan pemetaan masalah
4. Melakukan groundcheck hotspot apabila terdeteksi muncul hotspot di wilayah kerja
5. Pemadaman dini apabila terjadi kebakaran, meminta bantuan posko daops apabila membutuhkan dukungan

Tugas harian ini setiap harinya disampaikan melalui WA atau laporan tertulis ke Pos Komando Induk Karhutla sehingga laporan secara harian dan kondisi dari lapangan dapat selalu terpantau.

b. Persentase penurunan titik api (*hotspot*)

Persentase penurunan jumlah titik hotspot dapat dilihat dalam tabel indikator kinerja di atas , dimana persentase penurunan jumlah titik api dengan target 100 % , terealisasi 100 % dengan capaian kinerja 100%, dan ini artinya target tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Jumlah titik hotspot di Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdata di sepanjang tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.95 Kondisi Karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH HOTSPOT	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH PENANGANAN KEJADIAN	LUAS LAHAN TERBAKAR (ha)	KETERANGAN LUASAN LAHAN TERBAKAR PERWILAYAH (ha)
1	ANTANG KALANG	42	-	-	-	WILAYAH UTARA
2	TELAGA ANTANG	5	-	-	-	
3	BUKIT SANTUAI	7	-	-	-	
4	MENTAYA HULU	6	-	-	-	0
5	TUALAN HULU	3	-	-	-	0,00%
6	PARENGGEAN	16	-	-	-	WILAYAH TENGAH
7	KOTA BESI	1	-	-	-	
8	CEMPAGA HULU	10	-	-	-	
9	CEMPAGA	2	-	-	-	
10	TELAWANG	7	-	-	-	
11	SERANAU	0	-	-	-	1,5
12	BAAMANG	0	1	1	1,5	4,47%
13	M. B. KETAPANG	1	6	6	8,3	WILAYAH SELATAN
14	M. H. UTARA	3	1	-	6	
15	PULAU HANAUT	1	-	-	-	
16	M. H. SELATAN	0	-	-	-	32,05
17	TELUK SAMPIT	12	3	3	17,75	95,53%
TOTAL		116	11	10	33,55	33,55
PERSENTASE						100,00%

Dari tabel tersebut dapat dilihat penyebaran titik hotspot sepanjang tahun 2024 terdeteksi **116 titik hotspot** yang tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur sedangkan 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Seranau, Baamang dan Mentaya Hilir Selatan sepanjang tahun 2024 tidak terdeteksi titik hotspot. Titik hotspot terbanyak berada **di Kecamatan Antang Kalang sebanyak 42 hot spot**, diikuti oleh **Kecamatan Parenggean, Kecamatan Cempaga Hulu dan Kecamatan Teluk Sampit**. Keberhasilan tercapainya target Persentase penurunan titik api (hot spot) selain dilakukan pemadaman oleh tim yang tergabung dalam Pos Komando Kebakaran Hutan dan Lahan, juga setelah dilakukan groundchek ke lokasi titik api atau hot spot titik api tersebut telah padam dengan sendirinya karena intensitas hujan yang tinggi sehingga menyebabkan terendam air atau banjir.



Tabel 3.96 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 22 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	11,75	100	100	100,00	100,00	96
		Persentase penurunan jumlah titik api (<i>hot spot</i>)	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.97 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 22 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	-	22,9	100,00	100,00	100,00	100
2.	Persentase penurunan jumlah titik api (<i>hot spot</i>)	%	-	100,00	100,00	100,00	100	100

Sasaran " Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.98 Program dan Anggaran Sasaran 22 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penanggulangan Bencana	2.760.150.000,00	1.376.448.452,00	49,87

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran "Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman" adalah :

- Penyediaan laporan/informasi kejadian melalui beberapa media baik telepon, media massa maupun teknologi seperti whatsapp;
- Pos komando kebakaran hutan dan lahan yang diaktifkan di 11 kecamatan yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan
- Pelaksanaan piket jaga posko yang disiplin oleh Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kotawaringin Timur 24 jam setiap harinya sehingga setiap ada laporan bencana langsung dapat ditindak lanjuti.
- Adanya peran relawan yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang siaga dan tanggap.

Faktor – faktor yang menghambat pencapaian sasaran "Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman" adalah :



- Luasnya areal lahan dan hutan yang terbakar, terkadang apai yang sudah padam terbakar kembali karena sifat dari gambut terbakar dibawah permukaan.
- Kebiasaan masyarakat yang selalu tergantung dengan bantuan pemerintah ketika terjadi bencana.
- Faktor alam yang menyebabkan Kabupaten Kotawaringin Timur selalu berdampak kebakaran hutan dan lahan dimana disertai musim kemarau yang tidak menentu.
- Belum adanya sistem pendeteksian dini dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Belum optimalnya sosialisasi yang dapat menjangkau secara luas kesadaran masyarakat berkenaan dampak kebakaran hutan dan lahan

Faktor – faktor kendala dalam pencapaian sasaran "Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman" adalah :

- Keterlambatan laporan sehingga kebakaran meluas dan susah dikendalikan sehingga menimbulkan titik-titik hotspot baru.
- Daerah terbakar tidak mudah dijangkau
- Lokasi kebakaran sebagian di lahan gambut
- Sulitnya mendapatkan sumber air di areal kebakaran
- Terbatasnya sarana, prasarana, sumber daya manusia dan dana operasional terkait luas wilayah kebakaran hutan dan lahan
- Proses pemadaman kebakaran lahan dalam 1 (satu) lokasi terkadang memakan waktu lama

Saran dan tindak lanjut dalam pencapaian sasaran "Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman" adalah :

- Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- Peningkatan bantuan logistik dan peralatan kepada desa rawan kebakaran hutan dan lahan
- Peningkatan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) secara bertahap sehingga di masing-masing desa rawan bencana kebakaran sudah ada
- Peningkatan kinerja penanganan bencana dengan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mencukupi kebutuhan peralatan penanggulangan bencana serta meningkatkan koordinasi berbagai pihak baik instansi terkait, seluruh kecamatan maupun dunia usaha.

Sasaran Ke-23 : Meningkatnya jumlah karya dan cagar budaya yang dikelola

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran " Meningkatnya jumlah karya dan cagar budaya yang dikelola" dengan indikator kinerja Presentase Benda, Situs, Seni dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan mencapai **348,50%** dan termasuk predikat "**sangat tinggi**". Data capaian kinerja disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.99 Realisasi Indikator Sasaran 23 Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
1.	Presentase Benda, Situs, Seni dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	25,71	89,60	348,50	284,75	282,79
Rata -rata capaian					348,50	284,75	282,79

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Pembangunan urusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bertujuan agar setiap komponen masyarakat tetap memegang teguh kearifan lokal dalam setiap aspek aktivitas kehidupannya. Indikator capaian pembangunan urusan kebudayaan adalah melalui jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2021-2024

No.	ASPEK	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Event yang diikuti dan diselenggarakan)	-	-	-	-
2.	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	4	4	4	4
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	33	33	33	33

Sarana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa sanggar seni sampai tahun 2024 ada 4 (empat) buah yang rata-rata berada di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang, sedangkan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sampai Tahun 2024 yang dilestarikan tetap 33 (tiga puluh tiga) yang tersebar di beberapa kecamatan.

Tabel 3.100 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 23 Tahun 2024 dengan Target RPJMD

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya jumlah karya dan cagar budaya yang dikelola	Presentase Benda, Situs, Seni dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	21,12	25,71	89,60	348,50	27,78	323



Tabel 3.101 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 23 terhadap target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET RPJMD 2026
1.	Presentase Benda, Situs, Seni dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	N/A	20,50	64,24	66,54	89,60	29,73

Sasaran " Meningkatkan jumlah karya dan cagar budaya yang dikelola" tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

Tabel 3.102 Program dan Anggaran Sasaran 23 Tahun 2024

NO.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	2.205.500.000,00	1.991.154.780,00	90,28
2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	75.000.000,00	73.590.000,00	98,12
3.	Program Pembinaan Sejarah	24.900.000,00	20.096.492,00	80,71
4.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	15.000.000,00	13.640.000,00	90,93
5.	Program Pengelolaan Permuseuman	719.981.119,00	693.357.958,00	96,30

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran " Meningkatkan jumlah karya dan cagar budaya yang dikelola" adalah :

- Optimalisasi peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelestarian cagar budaya dari sumber daya yang tersedia dengan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan cagar budaya, dengan pembentukan Tim Registrasi Pendataan Cagar Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten, atau bisa meminjam dari Kabupaten / Kota lain yang sudah memiliki atau meminjam dari Provinsi.
- Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) tidak harus dari latar belakang Pendidikan arkeologi, bisa dari sejarah antropologi, arsitektur, yang penting memiliki sertifikat Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Bagi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang sudah habis masa berlakunya, bisa memperpanjang dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- Perlu ditingkatkannya sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sebagai upaya optimalisasi pelestarian cagar budaya.



C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diinformasikan sebagai berikut:

Secara komprehensif, akuntabilitas keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah Tahun 2024.

Sebagaimana tahun-tahun anggaran sebelumnya, pendanaan pembangunan pada tahun anggaran 2024 juga berasal dari pendapatan daerah yang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli daerah :

- Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan :

- Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

- Pendapatan Hibah
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- Pendapatan Lainnya

Di sisi lain, sebagai pelaksanaan tugas pemerintah daerah baik itu tugas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yaitu tugas desentralisasi, tugas selaku wakil pemerintah di daerah yaitu tugas dekonsentrasi dan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah yaitu tugas pembantuan, disertai juga dengan pendanaannya.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengacu pada kaidah - kaidah mengenai proses penyusunan APBD yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Lebih jauh lagi, dalam penyusunan APBD harus juga memperhatikan beberapa prinsip dalam disiplin anggaran, antara lain:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD / Perubahan APBD;



- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum daerah.

Oleh karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil, dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pada prinsipnya APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, sehingga secara ideal belanja yang direncanakan tidak boleh melebihi pendapatan yang ditargetkan. Namun demikian, dengan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD defisit anggaran dalam batas tertentu dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan catatan dapat ditutupi dari sumber-sumber yang lain dengan tidak melanggar peraturan perundang - undangan yang ada.

1. Pendapatan Daerah

Dalam menentukan arah pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur merumuskan 3 (tiga) strategi :

- a. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara intensif dan ekstensif.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia / petugas pengelola pendapatan daerah.
- c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak maupun retribusi.

Dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara intensif dan ekstensif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Intensifikasi

- a) Bidang Personil
 - Upaya intensifikasi bidang personil yaitu memberikan kesempatan yang seluas - luasnya bagi personil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti kursus Perpajakan, Keuangan Daerah, dan lain sebagainya.
 - Mengadakan pelatihan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi petugas baik di tingkat Kelurahan, Desa, maupun RT.
- b) Bidang Sarana dan Prasarana
 - Untuk menunjang pengembangan daya dukung operasional di daerah Kecamatan dan Dinas Instansi dalam rangka pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditunjuk Bendaharawan Khusus Penerima, Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Petugas Pungut yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.
 - Pembangunan Manual Pendapatan Asli Daerah (MAPATDA) yang didukung dengan menggunakan system LAN (*Local Area Network*).
 - Pembaharuan (*up date*) data wajib pajak dan wajib retribusi baik yang berada di wilayah Kecamatan sampai pedesaan secara berkala.
 - Meningkatkan sistem dan prosedur pungutan penerimaan dari Dinas / Unit / Satuan Kerja sampai Kecamatan di lingkungan Kab. Kotawaringin Timur.
- c) Meninjau kembali dan menyiapkan perubahan / penyempurnaan Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaannya yang sudah berlaku 5 (lima) tahun ke atas.

b. Ekstensifikasi



Ekstensifikasi dengan meningkatkan penegakan di Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah sesuai dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

- Menggali potensi pendapatan daerah pada masing-masing Dinas / Unit / Satuan Kerja sampai Kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Memanfaatkan sumber-sumber pendapatan secara efektif dan efisien. Dalam pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah harus betul-betul selektif dengan memperhitungkan nilai ekonomis suatu kegiatan, dengan kata lain harus mempunyai dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini senapas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan Penyusunan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Menumbuh kembangkan kesadaran dan peran serta masyarakat guna memenuhi kewajiban. Sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembangunan Manusia Berkelanjutan dan kita sepakat untuk itu bahwa pembangunan harus tetap dilanjutkan dan berkesinambungan namun harus kita sadari pula perlu dicari sumber dana untuk menunjang pembangunan dan diharapkan pendanaan berasal dari masyarakat. Kesadaran masyarakat akan kewajibannya terhadap pembayaran Pajak/Retribusi sangat diperlukan. Untuk menggugah masyarakat pentingnya kesadaran terhadap kewajibannya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengadakan penyuluhan secara berkesinambungan dengan kerjasama lintas sektoral.

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi APBD tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.103 Data Anggaran Realisasi APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	407.628.907.600,00	103.073.596.894,80	25,29
Pendapatan Retribusi Daerah	14.941.459.100,00	13.913.139.695,00	93,12
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.809.375.600,00	5.363.260.386,99	41,87
Lain-lain PAD yang Sah	149.763.571.100,00	186.856.258.818,64	124,77
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	585.143.313.400,00	309.206.255.795,43	52,84
PENDAPATAN TRANSFER			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan			
Dana Bagi Hasil (DBH)	272.591.069.000,00	521.544.878.000,00	191,33
Dana Alokasi Umum (DAU)	869.105.528.000,00	853.450.579.955,00	98,20
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.360.163.000,00	116.009.948.122,00	92,54
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	210.095.772.000,00	201.847.749.223,00	96,07
Jumlah	1.477.152.532.000,00	1.692.853.155.300,00	114,60
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
Dana Desa	154.928.308.000,00	154.928.308.000,00	100,00
Insentif Fiskal	22.835.288.000,00	22.835.288.000,00	100,00
Jumlah	177.763.596.000,00	177.763.596.000,00	100,00



Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	192.296.599.000,00	153.736.728.990,00	79,95
	192.296.599.000,00	153.736.728.990,00	79,95
Jumlah Pendapatan Transfer	1.847.212.727.000,00	2.024.353.480.290,00	109,59
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	-	8.129.604.527,63	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	8.129.604.527,63	-
Jumlah Pendapatan	2.432.356.040.400,00	2.341.689.340.613,06	96,27
BELANJA			
Belanja Operasi	1.841.538.823.190,00	1.673.563.087.864,33	90,88
Belanja Modal	400.036.627.101,00	336.995.147.754,47	84,24
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	1.587.053.374,00	31,74
Jumlah Belanja	2.557.473.464.100,00	2.313.798.763.149,80	90,47
TRANSFER			
Transfer			
Bagi Hasil Pajak Daerah	40.762.890.760,00	32.863.516.648,00	80,62
Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.494.145.910,00	1.132.850.094,00	75,82
Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	268.395.977.139,00	267.412.107.415,00	99,63
Jumlah Transfer	310.898.013.809,00	301.653.474.157,00	97,03
Jumlah Belanja	2.557.473.464.100,00	2.313.798.763.149,80	90,47
Surplus/(Defisit)	(125.117.423.700,00)	27.890.577.463,26	(22,29)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SiLPA	234.106.773.909,00	234.106.773.908,52	100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	234.106.773.909,00	234.106.773.908,52	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.280.000.000,00	14.280.000.000,00	93,46
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.280.000.000,00	14.280.000.000,00	93,46
Pembiayaan Neto	218.826.773.909,00	219.826.773.908,52	100,46
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	93.709.350.209,00	247.717.351.371,78	264,35

Sumber : BKAD Kab. Kotim Tahun 2024

Untuk mengetahui efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024, dapat diketahui dari besarnya anggaran yang dipergunakan untuk mencapai tiap - tiap sasaran kinerja atau sasaran strategis, sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut :



Tabel 3.104
EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

No.	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Meningkatnya kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	108,93	160.122.876.470,00	1542.11.328.501,00	96,31	3,69
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	198,68	14.091.737.731,00	13.899.952.697,00	98,64	1,36
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar	69,42	179.221.009.402,00	151.465.159.046,00	84,51	15,49
4.	Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi	112,13	4.964.729.850,00	4.778.174.810,00	96,24	3,76
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	100,56	59.108.628.013,00	45.348.611.617,00	76,72	23,28
6.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	100,57	209.992.840.354,00	178.959.494.486,00	85,22	14,78
7.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan keluarga	93,69	7.024.864.600,00	6.760.559.488,00	96,24	3,76
8.	Meningkatnya daya saing daerah	81,2	2.765.713.610,00	2.497.979.684,00	90,32	9,68
9.	Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga	93,85	5.720.905.350,00	4.501.795.313,00	78,69	21,31
10.	Meningkatnya keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	90,22	836.120.000,00	723.406.800,00	86,52	13,48
11.	Meningkatnya kesejahteraan petani	94,05	17.653.358.200,00	13.948.777.027,00	79,01	20,99
12.	Meningkatnya aktivitas ekonomi rakyat	74,73	1.133.058.000,00	1.074.208.304,00	94,81	5,19
13.	Menguatnya sektor pariwisata	139,43	486.074.000,00	427.838.915,00	88,02	11,98
14.	Meningkatnya investasi di daerah	136,42	383.598.000,00	358.878.750,00	93,56	6,44
15.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100	179.720.563.402,00	151.643.415.354,00	84,38	15,62
16.	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	98,10	4.708.910.890,00	2.575.468.828,00	54,69	45,31
17.	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	115	3.671.883.400,00	3.496.416.136,00	95,22	4,78
18.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	72,28	3.664.890.000,00	2.943.521.278,00	80,32	19,68
19.	Meningkatnya kemandirian desa	900	2.401.622.800,00	1.763.450.445,00	73,43	26,57



No.	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
20.	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	102,84	6.386.695.700,00	5.436.148.475,00	85,12	14,88
21.	Meningkatnya kualitas ruang publik	119,3	700.000.000,00	395.439.635,00	56,49	43,51
22.	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	100,00	2.760.150.000,00	1.376.448.452,00	49,87	50,13
23.	Meningkatnya jumlah karya dan cagar budaya yang dikelola	348,5	3.040.381.119,00	2.791.839.230,00	91,83	8,17
JUMLAH		150,00	870.560.610.891,00	597.166.984.770,00	68,60	31,40

Secara global dapat disimpulkan, bahwa penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2024, untuk mencapai sasaran kinerja, boleh dikatakan sudah efektif dengan rata - rata capaian kinerja 23 (Dua Puluh Tiga) sasaran strategis **150,00%** atau masuk kategori predikat **Sangat Tinggi**, dengan rata - rata realisasi penggunaan anggaran **68,60 %** dengan tingkat efisiensi **31,40%**

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara rinci akan dijabarkan melalui tabel dibawah ini.



Realisasi Anggaran Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi

Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2024	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SERAPAN ANGGARAN %
1	Meningkatnya kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	113.43	Program Penyelenggaraan Jalan	160.122.876.470,00	154.211.328.501,00	96,31
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	102.97				
2	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Persentase layanan angkutan darat, laut dan udara	100	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ	14,046,617,731.00	13,854,991,797.00	98.64
		Angka kecelakaan lalu lintas darat	107.27	Program pengelolaan pelayaran	45,120,000.00	44,960,900.00	99.65
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar	Persentase rumah tinggal bersanitasi (layak)	93.26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	175,955,693,402.00	148,602,718,316.00	84.45
		Persentase rumah tinggal bersanitasi (aman)	19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	700,000,000.00	395,439,635.00	56.49
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	102.86	Program kawasan permukiman	313,610,000.00	302,590,595.00	96.49
		Persentase penduduk berakses air minum	62.85	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,938,096,000.00	1,861,819,905	96.06



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2024	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SERAPAN ANGGARAN %
		Rasio rumah layak huni	78.17	Program kawasan permukiman	313,610,000.00	302,590,595.00	96.49
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	49.84				
4	Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	96.9	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi	4,964,729,850.00	4,778,174,810.00	96.24



Misi 2 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2024	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SERAPAN ANGGARAN %
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	101.21	Program Pengelolaan Pendidikan	42,188,087,991.00	29,629,168,368.00	70.23
		Harapan Lama Sekolah	100	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	16,920,540,022.00	15,719,443,249.00	92.9
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	105.97	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	175,955,693,402.00	148,602,718,316.00	84.45
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	32,337,729,152.00	29,105,766,221.00	90.01
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	530,657,000.00	392,664,349.00	74.00
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1,168,760,800.00	858,345,600.00	73.44
3	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85.54	Program Pengarusutamaan Gender Dan	829,512,000.00	808,595,850.00	97.48
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	81.09	Program Perlindungan Perempuan	144,478,000.00	76,692,915.00	53.08
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,681,794,600.00	2,508,190,723.00	93.53



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2024	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SERAPAN ANGGARAN %
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	3,369,080,000.00	3,367,080,000.00	56.18
4	Meningkatnya daya saing daerah	Produktivitas Total Daerah	74.31	Program Penempatan Tenaga Kerja	100,000,000.00	98,986,600.00	98.99
		Angka Kriminalitas Yang Tertangani	128.46				
				Program Hubungan Industrial	154,287,050.00	149,371,950.00	96.81
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,700,640,260.00	1,463,383,034.00	86.05
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	810,786,300.00	786,238,100.00	96.97
5	Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga	Persentase wirausaha muda	97.17	Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	524,777,550.00	471,111,807.00	89.77
		Jumlah prestasi olahraga	120.83	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	5,196,127,800.00	4,030,683,506.00	77.57



Misi 3 : Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2024	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatnya keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	97.65	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	770,714,200.00	675,058,600.00	87.59
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	20,530,400.00	15,268,200.00	74.37
				Program Pengawasan Kerawanan Pangan	44,875,400.00	33,080,000.00	73.72
2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	95.59	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9,248,725,700.00	8,555,114,162.00	92.50
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6,534,791,300.00	3,852,033,955.00	58.95
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	160,787,700.00	141,428,350.00	87.96
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	69,345,200.00	67,262,300.00	87.96
				Program Perizinan Usaha Pertanian	80,000,800.00	54,258,850.00	67.82
3	Meningkatnya aktivitas ekonomi rakyat	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	102.2	Program Penyuluhan Pertanian	1,559,707,500.00	1,278,679,410.00	81.98
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	112,670,000.00	111,320,000.00	98.80
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	112,670,000.00	111,320,000.00	98.80
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	166,556,000.00	153,971,590.00	92.44



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2024	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	667,600,000.00	644,533,914.00	96.54
				Program Pengembangan UMKM	73,562,000.00	53,062,800.00	72.13
4	Menguatnya sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	153.46	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	115,000,000.00	113,609,262.00	98.79
				Program Pemasaran Pariwisata	346,074,000.00	291,067,653.00	84.11
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25,000,000.00	23,162,000.00	92.65
5	Meningkatnya investasi di daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	91.69	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	383,598,000.00	358,878,750.00	93.56



Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2024	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	175,955,693,402.00	148,602,718,316.00	84.45
				Program Pendaftaran Penduduk	49,990,000.00	47,461,165.00	94.94
				Program Pencatatan Sipil	49,990,000.00	49,714,595.00	99.45
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,664,890,000.00	2,943,521,278.00	80.32
2	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	100	Program Penyelenggaraan Pergawasan	3,536,910,000.00	1,792,366,591.00	50.68
		Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention</i> (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	92,39	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	447,695,090.00	250,481,550.00	55.95
		Nilai SAKIP	100	Program Penataan Organisasi	242,621,600.00	172,867,058.00	71.25
		Nilai LPPD	100	Program Administrasi Tata Pemerintahan	481,684,200.00	359,753,629.00	74.69
3	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	124.4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3,671,883,400.00	3,496,416,136.00	95.22
4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	101.43	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,664,890,000.00	2,943,521,278.00	80.32
5	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Desa Mandiri	1,000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1,005,055,400.00	680,242,568.00	67.68
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	1,396,567,400.00	1,083,207,877.00	77.56



Misi 5 : Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2024	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SERAPAN ANGGARAN %
1	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	88.52	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,513,625,000.00	1,102,169,854.00	72.82
		Indeks Kualitas Udara	102.29				
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	97.1	Program Pengelolaan Persampahan	4,873,070,700.00	4,333,978,621.00	88.94
		Timbulan Sampah yang Ditangani	143.42				
2	Meningkatnya kualitas ruang publik	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	82.9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	700,000,000.00	395,439,635.00	56.49
3	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100	Program Penanggulangan Bencana	2,760,150,000.00	1,376,448,452.00	49.87
		Persentase penurunan jumlah titik api (<i>hot spot</i>)	100				
4	Meningkatnya jumlah karya dan cagar budaya yang dikelola	Presentase Benda, Situs, Seni dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	282.79	Program Pengembangan Kebudayaan	2,205,500,000.00	1,991,154,780.00	90.28
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	75,000,000.00	73,590,000.00	98.12
				Program Pembinaan Sejarah	24,900,000.00	20,096,492.00	80.71
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	15,000,000.00	13,640,000.00	90.93
				Program Pengelolaan Permuseuman	719,981,119.00	693,357,958.00	96.30



E. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LAN JUT (RATL)	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Mereviu kembali Perencanaan Kinerja secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup, sehingga dapat menjawab isu strategis yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Implikasinya, manfaat program dan kegiatan yang ditetapkan dapat berdampak langsung bagi masyarakat.	Membuat surat ke kepala OPD untuk menyampaikan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD per triwulan
2	Penyusunan Penjenjangan Kinerja dari level strategis-taktikal-operasional harus berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework. Dalam mencari turunan kerja pada level strategis maka perlu dilakukan pemetaan critical success factor yang relevan. Hasil penjenjangan kinerja ini kemudian harus dimanfaatkan atau diterjemahkan pada perjanjian kinerja dan SKP Pegawai	Melaksanakan Asistensi Penyusunan Penjenjangan Kinerja untuk perbaikan kualitas sebagai dasar pemetaan, mulai dari level strategis untuk diterjemahkan pada Perjanjian Kinerja dan SKP Pegawai	Bagian Organisasi Setda	Masih dalam proses
3	Memastikan bahwa penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya mengacu pada capaian dan realisasi tahun sebelumnya	Evaluasi RKPD n-1 sebagai dasar menyusun RKPD tahun berikutnya	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sebagai bahan penyusunan Bab II RKPD yaitu Gambaran Umum kondisi Daerah
4	Melakukan pengembangan Aplikasi SILAKIP agar dapat melakukan pengukuran kinerja secara berkala pada level Pemerintah Daerah dan PD, sehingga bukan hanya dipakai sebagai tempat untuk mengumpulkan dokumen perencanaan.	1. Bagian Organisasi a. Melakukan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Kota Bandung untuk Replikasi Aplikasi SILAKIP; b. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pelatihan kepada Operator Pengelola SAKIP pada Perangkat Daerah c. Melaksanakan evaluasi berkala dalam pemenuhan dokumen-dokumen pendukung SAKIP	Bagian Organisasi Setda	Progres : Bagian Organisasi : Masih dalam tahap perencanaan pelatihan operator, untuk target pelaksanaannya pada tahun anggaran 2025 dengan pendamping dari tenaga ahli dan Programmer Pemkot. Bandung



NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LAN JUT (RATL)	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
		2. BKAD : Target-target kinerja dalam sasaran rencana kinerja tahunan agar menjadi prasyarat pengajuan dan pengalokasian anggaran	BKAD	Progres BKAD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan mengenai target kinerja dalam sasaran terkait dengan Pengajuan dan Pengalokasian Anggaran
		3. DISKOMINFO : a. Memfasilitasi kebutuhan Pembuatan dan pengembangan Aplikasi ESAKIP. b. Menyusun dan Menyiapkan Proses Bisnis SAKIP untuk mendukung dan Menyesuaikan Kebutuhan Pembuatan Aplikasi ESAKIP	Diskominfo	Progres Diskominfo : Masih Dalam Proses
5	Melakukan perbaikan terhadap seluruh dokumen Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan melengkapi secara detail definisi operasional/penjelasan dan formulasi perhitungan atas masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan.	Indikator Aspek Pelayanan Umum sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Tergambar dalam Bab VI RKPD yaitu Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
6	Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja organisasi sebagai dasar dalam menilai kinerja individu serta dijadikan dasar dalam melakukan revaluasi terhadap rencana hasil kerja individu yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi	BKPSDM : Melaksanakan pengukuran kinerja individu kepada seluruh pegawai menggunakan E-Kinerja sebagai dasar menilai kinerja pegawai untuk pencapaian kinerja organisasi	BKPSDM	BKPSDM : Sudah diterapkan sebagai dasar pengukuran kinerja individu
7	Mendorong pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menjadi masukan dalam menentukan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran kedepan, serta pemberian reward and punishment baik kepada individu maupun PD.	1. Bagian Organisasi :Melakukan Monev dan Membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut pada seluruh Perangkat Daerah atas hasil evaluasi sebelumnya	Bagian Organisasi Setda	1. Bagian Organisasi : Hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi dapat dilihat pada ESAKIP Revaluasi Kementerian PANRB
		2. Inspektorat : Melakukan monev pada laporan kinerja PD dalam penyusunan sasaran strategis dan mendorong pemberian reward dan punishment	Inspektorat	2. Inspektorat : Monitoring dan Evaluasi kinerja terus dilakukan sampai akhir tahun
		3. BKPSDM : Pemberian reward kepada individu sebagai penghargaan atas kinerja pegawai diberikan dalam bentuk pemberian tugas belajar, pemberian pelatihan sesuai jabatan dan kompetensi, pemberian satya lencana.	BKPSDM	3. BKPSDM : Telah dilakukan pemberian reward kepada pegawai atas kinerja yang baik



NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LAN JUT (RATL)	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
8	Memperbaiki dan meningkatkan kualitas dokumen laporan akuntabilitas kinerja level Kabupaten dan PD, diantaranya dengan memastikan bahwa laporan kinerja menyajikan informasi terkait berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja yang telah diperjanjikan disertai dengan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/rinci, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja di tahun selanjutnya.	1. Bagian Organisasi : - Melakukan penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh Tim Evaluator SAKIP terhadap laporan akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah dengan breakdown (analisis) perencanaan dilakukan evaluasi setiap triwulan atas capaian kinerjanya - Memastikan keselarasan perencanaan kinerja di level PD, khususnya antara renstra dengan perjanjian kinerja (PK), sehingga pencapaian kinerja yang ditetapkan dapat terkawal dengan baik - Menyusun Perjanjian Kinerja mulai dari level jabatan pimpinan tinggi sampai dengan jabatan pelaksana	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda : 1. Perangkat daerah telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) atas hasil evaluasi internal (Bukti telah di upload pada ESAKIP Reviu Kemenpan RB) 2. Seluruh perangkat daerah diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja mulai dari level jabatan pimpinan tinggi sampai dengan jabatan pelaksana untuk seluruh perangkat daerah di awal tahun 2025.(Bukt PK telah di Aload pada ESAKIP Reviu Kemenpan RB) 3. Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap Triwulanan, dibuat dalam bentuk Matrik (laporan Monev Renaksi/ bukti telah di aload, dapat dilihat pada ESAKIP Reviu KemenpanRB) 4. Evaluasi Realisasi Capaian Kinerja terus dilakukan secara berkala
		2. Inspektorat : Melakukan evaluasi hasil TL pada Dokumen laporan Akuntabilitas kinerja Kabupaten & PD terkait upaya-upaya yang telah dilakukan. Dilakukan perbaikan pada laporan kinerja dengan menyajikan analisis faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja	Inspektorat	Inspektorat : Reviu dan Evaluasi Laporan Kinerja PD terus dilakukan secara berkala untuk mendorong perbaikan kinerja
9	Memastikan laporan kinerja PD pada periode selanjutnya menyajikan informasi terkait analisis faktor pendukung dan penghambat tercapainya kinerja serta upaya/strategi yang digunakan di tahun berikutnya untuk meningkatkan kinerja.	Dilakukan perbaikan pada laporan kinerja dengan menyajikan analisis faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja	Bagian Organisasi Setda	Laporan Kinerja PD masih dalam proses evaluasi internal oleh Tim Evaluator Internal Inspektorat



NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LAN JUT (RATL)	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
10	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan, target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.	1. Bagian Organisasi : Melaksanakan fasilitasi terhadap peningkatan kualitas dokumen laporan kinerja Kabupaten dan Perangkat daerah	Bagian Organisasi Setda	1. Progres Bagian Organisasi: Masih dalam proses
		2. Inspektorat Melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap penetapan seluruh target kinerja pada PD	Inspektorat	2. Inspektorat : Masih melakukan proses reviu dan evaluasi laporan kinerja Kabupaten dan Perangkat Daerah.
11	Meningkatkan kualitas evaluasi internal yang telah dilakukan dengan memberikan temuan dan rekomendasi untuk setiap PD yang tidak hanya pada pemenuhan dokumen, namun pada aspek kualitas dan pemanfaatan di setiap komponen SAKIP sehingga setiap PD mampu melaksanakan rekomendasi yang disampaikan dengan baik dan mampu memberikan perbaikan yang signifikan.	1. Bagian Organisasi : Melaksanakan fasilitasi terhadap peningkatan kualitas dokumen laporan kinerja Kabupaten dan Perangkat daerah dengan menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Eksternal (Kabupaten) dan hasil evaluasi SAKIP internal (perangkat daerah)	Bagian Organisasi Setda	Progres Bagian Organisasi : 1. Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Internal (Perangkat Daerah) sudah disusun dan sudah di upload (Dapat dilihat pada ESAKIP Reviu Kemenpan RB) 2. Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Internal sudah disusun dan sudah di upload (Dapat dilihat pada ESAKIP Reviu Kemenpan RB)
		2. Inspektorat - Melakukan evaluasi dan komunikasi terhadap PD atas hasil evaluasi internal yang dilakukan dalam TL Hasil Temuan dan Rekomendasi yang telah dilakukan	Inspektorat	Monev terus dilakukan sampai akhir tahun
12	Mendorong pelaksanaan pemantauan secara berkala rekomendasi yang diberikan kepada PD melalui LHE AKIP internal guna memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan dalam menjawab rekomendasi tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan oleh evaluator internal dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan	1. Bagian Organisasi : - Perangkat daerah Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut atas LHE Internal sebagai aksi dalam mendukung ketercapaian kinerja serta mengetahui kendala dan hambatan untuk dicarikan solusinya sebagai upaya perbaikan kinerja kedepannya. - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja (IKU) Kabupaten dan Perangkat Daerah - Melaksanakan fasilitasi untuk penyusunan RATL SAKIP internal seluruh perangkat daerah - Melaksanakan evaluasi terhadap progres capaian dari RATL perangkat daerah	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi : 1. Monev capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten dan perangkat daerah dievaluasi setiap triwulan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten



NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LAN JUT (RATL)	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
		2. Inspektorat - Melakukan evaluasi dan pemantauan pada PD secara berkala terhadap Tindak Lanjut atas rekomendasi (LHE Internal)	Inspektorat (Tim Evaluator Internal SAKIP)	2. Inspektorat : Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas rencana aksi tindak lanjut (RATL) perangkat daerah.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Gambaran tentang kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2024 telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, kekurangan yang terjadi dalam tahun 2024 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun-tahun mendatang. Sasaran organisasi yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran organisasi pada masa selanjutnya dapat dicapai dengan lebih baik.

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi kelancaran implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja sampai saat ini adalah mekanisme pengumpulan data kinerja belum maksimal sehingga dukungan data faktual kurang lengkap guna memenuhi target indikator sasaran organisasi yang pada gilirannya berakibat pengukuran kinerja serta analisa kinerja tidak maksimal.

Dengan telah dilaksanakannya seluruh kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur agar terciptanya sistem fungsi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur daerah yang pada akhirnya akan memperlihatkan bahwa tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dari hasil penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai langkah yang akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam peningkatan kinerja tahun mendatang, yaitu dengan memperbaiki sistem kerja, memantapkan *team work* dan melakukan koordinasi serta komunikasi yang lebih baik secara berkelanjutan agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.



B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai langkah yang akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan serta strategi peningkatan kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam peningkatan kinerja tahun mendatang, yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan;
2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna pemenuhan indikator sasaran secara maksimal dengan meningkatkan pemanfaatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja SKPD.
3. Memperbaiki sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja dalam sistem pelaporan secara berkala dengan meningkatkan analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala. Selanjutnya melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara individu terhadap pertanggungjawaban kinerja SKPD, serta meningkatkan kualitas revidi atas laporan kinerja Pemda maupun SKPD;
4. Meningkatkan fungsi pengawasan/ pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.
5. Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, dengan memanfaatkan dokumen kinerja dalam proses perencanaan kinerja selanjutnya.
6. Menyempurnakan kualitas rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja terkait dalam sasaran strategis Pembangunan daerah maupun sasaran strategis organisasi dengan membangun dari bawah indikator kinerja yang baik dengan melakukan perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja secara berjenjang secara menyeluruh sampai pada semua levelan pejabat eselon terendah.
7. Meningkatkan komitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta meningkatkan pembinaan dalam penerapannya melalui pemberian reward bagi SKPD yang berkinerja tinggi dan memberikan punishment bagi SKPD yang belum maksimal berkinerja dengan baik.



LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman KM. 6,3 Sampit 74322 Telp. (0531) 21082, Fax. 30374,
Email: inspektorat@kotimkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sampit, 21 Maret 2025
Inspektur Daerah,

Masri, S.E., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651022 199401 1 008

